



LAPORAN

SOSIALISASI SISTEM

AKUNTABILITAS

KINERJA PEMERINTAH

(SAKIP) 2019

**Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
Provinsi Kalimantan Timur**

KATA PENGANTAR

Puji syukur alhamdulillah kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena telah melimpahkan rahmat-Nya berupa kesempatan dan pengetahuan sehingga Laporan Sosialisasi **SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP)** ini bisa selesai pada waktunya.

Terima kasih juga kami ucapkan kepada semua pihak yang telah berkontribusi dengan memberikan ide-idenya sehingga Laporan Sosialisasi **SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP)** ini bisa disusun dengan baik dan rapi.

Kami berharap semoga makalah ini bisa menambah pengetahuan para pembaca. Namun terlepas dari itu, kami memahami bahwa Laporan Sosialisasi **SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP)** ini masih jauh dari kata sempurna, sehingga kami sangat mengharapkan kritik serta saran yang bersifat membangun demi terciptanya Laporan selanjutnya yang lebih baik lagi

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	I
DAFTAR ISI.....	II
I. PENDAHULUAN.....	1
A. LATAR BELAKANG.....	1
B. TUJUAN.....	3
C. LANDASAN HUKUM	3
II. PELAKSANAAN KEGIATAN.....	4
A. WAKTU & TEMPAT	4
B. PESERTA DAN NARASUMBER	4
C. METODE PELAKSANAAN.....	4
D. AGENDA KEGIATAN.....	5
III. HASIL KEGIATAN,PEMBIAYAAN, DAN NOTULENSI.....	6
A. HASIL KEGIATAN.....	6
B. PEMBIAYAAN.....	6
C. NOTULENSI	6
IV. PENUTUP.....	7

A. PENDAHULUAN

1. LATAR BELAKANG

Hingga saat ini Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) lebih sering dipandang sebagai sebuah mekanisme untuk mempertanggungjawabkan kinerja. Pendekatan tersebut berpijak pada sudut pandang eksternal atau pemenuhan kepentingan stakeholders. Pandangan ini tidaklah salah. Namun, dengan pemahaman seperti itu, peran SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) menjadi lebih sempit dan cenderung tidak memunculkan kesadaran instansi pemerintah atas kebutuhan penerapan SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) secara benar.

SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) sesungguhnya dapat dilihat dari sudut pandang yang lain. Dalam kerangka PP 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) disebutkan bahwa dalam unsur kegiatan pengendalian terdapat dua sub unsur yang menegaskan fungsi SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) yang jauh lebih besar. Sub unsur tersebut adalah reviu atas kinerja dan reviu atas indikator kinerja. Kedua sub unsur tersebut dengan tegas menyebutkan penetapan indikator kinerja dan reviu kinerja sebagai bagian dari aktivitas pengendalian. Sehingga berfungsinya SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) dengan baik adalah wujud penerapan SPIP.

Hingga kini SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) belum berfungsi baik sebagai media pertanggungjawaban kinerja maupun sebagai alat pengendalian manajemen. Infrastruktur pembangun SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) kini sudah terbangun. Jika diibaratkan sebuah bangunan, kekuatan bangunan tersebut sangat tergantung dari bahan yang digunakan untuk membangunnya. Bahan itulah yang merupakan komponen pembangun SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) yang terdiri dari Renstra, Renja, Tapkin dan LAKIP.

Jika saat ini infrastruktur SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI

PEMERINTAH (SAKIP) telah terbangun, mengapa pertanyaan-pertanyaan di atas masih muncul? SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) sesungguhnya mempunyai dua peranan yaitu sebagai media pertanggungjawaban kinerja dan sebagai alat pengendalian manajemen. Pemahaman atas kedua sudut pandang dalam pendekatan SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) tersebut akan dapat memberikan arah agar SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) tidak sekedar menjadi formalitas. Justru, penerapan SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) seharusnya mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik, terwujudnya pemerintahan yang bersih dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Kegiatan Sosialisasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2019 oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur merupakan salah satu upaya yang ditempuh untuk pertanggungjawaban kinerja dan sebagai alat pengendalian manajemen Kegiatan ini dirancang melalui mekanisme kerjasama yang melibatkan pihak Biro Ortal Setda Prov. Kaltim dan KPW (Koordinator Pendamping Wilayah) Prov. Kaltim dengan DPMPD Prov. Kaltim. Kegiatan ini juga dimaksudkan guna memperkenalkan konsep SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) yang benar sehingga dapat menjadi acuan tata kelola pemerintahan yang baik.

Mengingat pentingnya SAKIP ini maka DPMPD Provinsi Kaltim melakukan kegiatan Sosialisasi SAKIP di lingkup pegawai PNS dan Non PNS di DPMPD Kaltim.

B. TUJUAN KEGIATAN

1. Memberikan pemahaman kepada peserta Sosialisasi terkait Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
2. Memperkenalkan konsep Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sesuai Perpres 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)
3. Mendorong akuntabilitas Pemerintah Khususnya Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur
4. Mendorong pengukuran kinerja organisasi sampai dengan individu
5. Memberikan pengetahuan mengenai penyelarasan perencanaan kinerja dengan kebijakan pimpinan daerah.

C. LANDASAN HUKUM

1. TAP MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN
2. UU Nomor 28 Tahun 1999
3. UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (sebelumnya diatur dalam Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999, pada 21 April 2014 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
Peraturan MenPAN & RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Peraturan MenPAN & RB Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi dan Implementasi SAKIP
Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala BAPPENAS Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Strategis Kementerian/Lembaga 2015-2019

II. PELAKSANAAN KEGIATAN

A. WAKTU DAN TEMPAT

Kegiatan Sosialisasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) 2019 dilaksanakan pada hari Selasa, Tanggal 29 Oktober 2019 di Hotel Novotel, Balikpapan

C. PESERTA DAN NARASUMBER

Kegiatan Sosialisasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) 2019 dihadiri oleh Pegawai Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur, yang terdiri dari Pejabat Struktural, Pelaksana, dan Tenaga Kontrak. Proses yang dilakukan oleh Panitia dalam mengundang peserta adalah dengan NOTA DINAS yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas.

Narasumber Kegiatan Sosialisasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) 2019 adalah dari Biro Organisasi dan Tata Laksana Seta Prov. Kaltim dan Koordinator Pendamping Wilayah Prov. Kaltim (Data Terlampir)

D. METODE PELAKSANAAN

Pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) 2019 diselenggarakan dengan metode mendengarkan narasumber menyampaikan paparan, kemudian dilanjutkan dengan tanya jawab yang dipandu oleh moderator oleh Sekretaris DPMPD Prov. Kaltim.

E. AGENDA KEGIATAN

Sosialisasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2019
menawarkan agenda acara sebagai berikut :

Waktu	Kegiatan	Penanggung Jawab
08.00 – 08.30	Registrasi Peserta	Panitia Lokal
08.30 – 09.00	Acara Pembukaan <ul style="list-style-type: none">- Menyanyikan Lagu Indonesia Raya- Pembacaan Do'a- Sambutan dari Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur	Panitia Lokal
09.00 – 09.15	Coffee Break	-
09.15 – 11.00	Sosialisasi tentang SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP), IKU, dan PK	Setya Pratiwi,SH,M.Hum (Kasubbag. Akuntabilitas Kinerja, Biro Ortal Setda Prov. Kaltim)
11.00 – 12.00	Diskusi dan Tanya Jawab	Moderator
12.00 – 13.00	Ishoma	Panitia
13.00 – 15.00	Rapat Pembahasan IDM	Alwani (Koordinator P3MD Kaltim)
15.00 – 16.00	Diskusi dan Tanya Jawab	Moderator
16.00 - Selesai	Penutup	Panitia

III. HASIL KEGIATAN, PEMBIAYAAN, DAN NOTULENSI

A. HASIL KEGIATAN

Hasil kegiatan yang diperoleh selama proses kegiatan adalah sebagai berikut :

1. Terlaksanannya kegiatan Sosialisasi SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) 2019 yang dikemas dalam kegiatan Workshop dan Tanya jawab.
2. Jumlah undangan dan kehadiran di hari H sesuai dengan rencana awal.
3. Terlaksanannya sharing pengetahuan terkait IDM (Indeks Desa Membangun), dan sharing terkait Informasi yang dikecualikan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur
4. Terjalinnnya kerjasama antara pihak DPMPD Prov. Kaltim dengan Biro Ortal Setda Prov. Kaltim dalam beberapa aspek pengembangan, yaitu IKU, IKI, dan Pengembangan Kinerja.

B. PEMBIAYAAN

Pembiayaan Kegiatan Sosialisasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) 2019 dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2019

c. NOTULENSI

IV.PENUTUP

Demikianlah laporan ini dibuat sebagai bukti tertulis atau bukti fisik pelaksanaan kegiatan. Di samping itu, laporan ini dapat digunakan sebagai acuan atau pedoman kegiatan yang akan datang sehingga segala kekurangan dapat diperbaiki dan hal hal yang sudah baik bisa ditingkatkan



LAMPIRAN

SURAT MENYURAT



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA
Jl. MT. Hariyono No. 96/IV. A Telp. : (0541) 7779726 Fax. : (0541) 7779725 Samarinda - 75124

Samarinda, 22 Oktober 2019

Nomor : 050/ 510 /Rengram
Lampiran : 1 Lembar
Perihal : Sosialisasi SAKIP

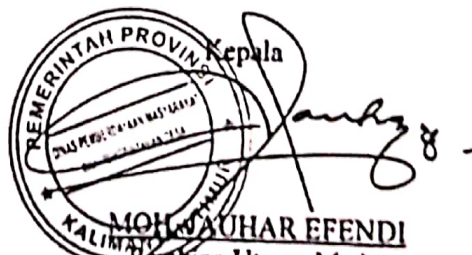
Kepada
Yth. Kepala Biro Organisasi
Setda Provinsi Kalimantan Timur
Di - Samarinda

Menghubungi kembali surat kami Nomor 050/ 395/ Rengram, tanggal 13 Agustus 2019 perihal Permintaan Narasumber SAKIP, dengan ini disampaikan kepada Saudara bahwa pelaksanaan kegiatan Sosialisasi SAKIP dilingkup Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Prov. Kaltim akan dilaksanakan pada:

Hari : Selasa
Tanggal : 29 Oktober 2019
Tempat : Hotel Novotel Balikpapan

Biaya Perjalanan Dinas Narasumber akibat kegiatan tersebut dibebankan pada anggaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih


Kepala
MOH. WAHAR EFENDI
Pembina Utama Madya
NIP. 19611216 198603 1 014



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA
Jl. MT. Hariyono No. 96/TV. A Telp. : (0541) 7779726 Fax. : (0541) 7779725 Samarinda - 75124

Samarinda, 13 Agustus 2019

Kepada

Nomor : 050/ 395 /Rengram
Perihal : Permintaan Narasumber SAKIP

Yth. Kepala Biro Organisasi
Setda Provinsi Kalimantan Timur
Di -

Samarinda

Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintah dilingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur.

Kami merencanakan melaksanakan kegiatan Sosialisasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang diagendakan pada minggu ke-4 bulan Agustus atau pada bulan September Tahun 2019.

Berkenaan dengan kegiatan tersebut, mohon kiranya dapat diberikan fasilitasi dengan menugaskan Pejabat yang menangani Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagai Narasumber.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih

Kepala


MOH. FAUHAR EFENDI
Pemda Utama Madya
NIP. 19611216 198603 1 014



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA
Jalan MT. Haryono No 96/1V A Telp. (0541) 748323 Fax. (0541) 741393
SAMARINDA 75124

Samarinda, 22 Oktober 2019

Kepada :

Nomor : 050 / 513 / Prog.
Lampiran :
Perihal : Ralat Tempat Pelaksanaan Rapat
Pembahasan IDM

Yth. 1. Koordinator Wilayah
P3MD Kaltim
2. Satker P3MD Kaltim

di-
Samarinda

Menindaklanjuti Surat Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur No 005/490/Prog perihal Rapat Pembahasan IDM, sehubungan dengan adanya perubahan tempat pelaksanaan kegiatan, berkenaan dengan hal tersebut bersama ini disampaikan informasi sebagai berikut :

Acara semula :
Hari/Tanggal : Selasa/29 Oktober 2019
Pukul : 12.00 Wita – Selesai
Tempat : Harris Hotel Samarinda

Diubah menjadi :
Hari/Tanggal : Selasa/29 Oktober 2019
Pukul : 12.00 Wita – Selesai
Tempat : Hotel Novotel Balikpapan

2-
Samarinda

Berkaitan pelaksanaan kegiatan tersebut diinformasikan bahwa pembiayaan dibebankan pada anggaran masing-masing.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

KEPALA,

Dr. H. Moh. Jauhar Efendi, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP.19611216 198603 1 014



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
SEKRETARIAT DAERAH
JALAN GAJAH MADA. TELEPON : (0541) 733333 FAX. (0541) 737762 - 742111
Website : <http://kalimprov.go.id>
SAMARINDA 75121

Samarinda, 23 September 2019

Kepada

Yth. Dinas Pemberdayaan Masyarakat
dan Pemerintahan Desa Prov.
Kalimantan Timur.
di - Samarinda

Nomor : 066/5904/B.Org
Sifat : -
Lampiran : -
Hal : Penyampaian Nama Narasumber

Menghubungi Surat Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat
dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur Nomor :
050/395/Rengram, tanggal 13 Agustus 2019, hal Permintaan
Narasumber SAKIP, dan bersama ini disampaikan nama Pejabat dari
Biro Organisasi Setda Prov. Kaltim sebagai Narasumber pada acara
dimaksud, atas nama :

4. a. Nama : Dra. Nursehan, M.Si
b. NIP : 19621204 199203 3 005
c. Pangkat / Gol : Pembina Tingkat I (IV/b)
d. Jabatan : Kabag. Pengembangan Kinerja Instansi
5. a. Nama : Setya Pratiwi, SH, M.Hum
b. NIP : 19670525 198811 2 003
c. Pangkat / Gol : Pembina Muda Tk I (IV/a)
d. Jabatan : Kasubbag. Akuntabilitas Kinerja
6. a. Nama : Alif Muktalipun, A.Md
b. NIP : 19850710 201101 1 002
c. Pangkat / Gol : Penata Muda (III/a)
d. Jabatan : Pranata Komputer

Demikian disampaikan, terima kasih.

a.n. SEKRETARIS DAERAH
ASISTEN ADMINISTRASI UMUM
u.b.
KEPALA BIRO ORGANISASI,

Rozani Erawadi, S.H, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19710124 199703 1 007


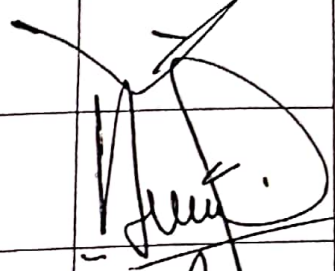
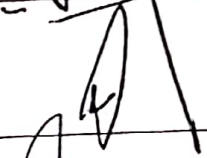
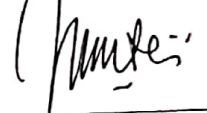
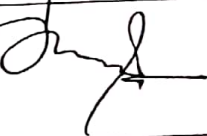
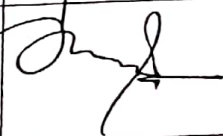
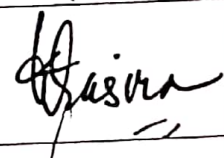

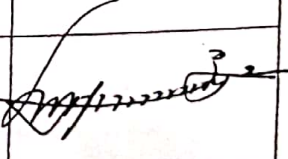
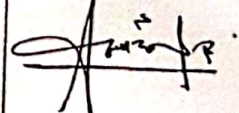
Tembusan :
Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur (sebagai laporan)

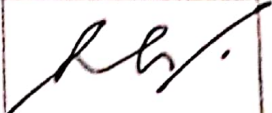

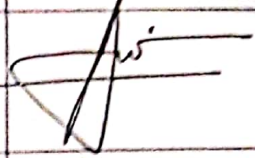
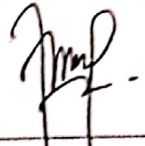
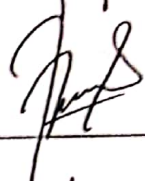
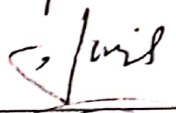
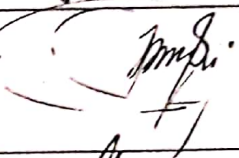

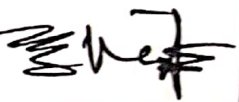

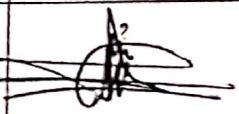




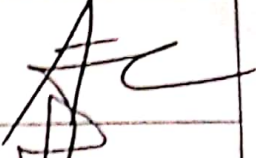
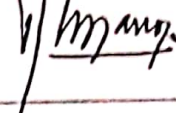
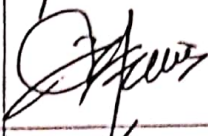
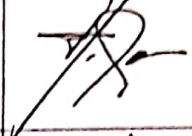
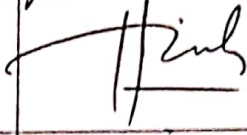
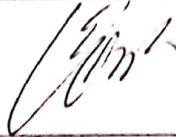
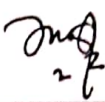


LAMPIRAN




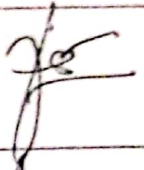


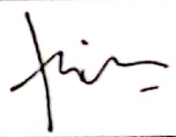



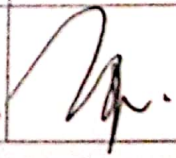
ABSEN KEHADIRAN

DAFTAR HADIR
SOSIALISASI SAKIP 2019
29 Oktober 2019

No.	Nama	Jabatan	P/L	No.HP Yang Bisa Dihubungi	Tanda Tangan
1	Moh. Jaehar	Kabid	L		
2	Surono	Sehennis	L		
3	Riani Tisnadewi	Kabid PDKP	P		
4	Purwati	Kabid IV			
5	ISNAKLI TRIKORAWATI	KABID III	P	08125302231	
6	Mustafa	Kasi PDKP	L	08236991999	
7	Kasmawati	Kasi KKAD	P	081347200302	
8	ELVIS	Kasi PD	L	081254982722	
9	Huzaimah	Kasi Ketahanan & Sosial Masyarakat	P	0852.4611.4220	
10	Vincentus Samud	Kasi Kesehatan Desa & Keluarga	L	0821.5557.4042	

No.	Nama	Jabatan	P/L	No.HP Yang Bisa Dihubungi	Tanda Tangan
11	ABDUL HAIRUL	Staf umum	L	081253783256	
12	Aris Firda	Staf	L	08155073688	
13	A.M. Faisal	Pelaksana	L	08154761376	
14	Zakaria	Pelaksana	L	081347718606	
15	Fuhandoyadi	Pelaksana	L	085349850017	
16	Ekumenisitas	Pelaksana	P.	081346294886	
17	Abdul Majid	Pelaksana	L.	0812.5393.945	
18	Sabrie, SE	Staf Div IV	L	085389731079	
19	Asmawati	Pelaksana	P	08246669009	
20	Pulisan Roviati	Pelaksana	P	081347652266	
21	Fachroni, S.S.P	Staf Umum	L	081253285340	

No.	Nama	Jabatan	P/L	No.HP Yang Bisa Dihubungi	Tanda Tangan
22	M. EDY Ogi urmo	pelaksana	L		
23	NOOR MUSLIM	- - -	L		
24	Abdi-G	- - -	L		
25	Mustani	- - -	L		
26	Septian S.	- - -	L		
27	Fidriatun akia	Pelaksana	P		
28	Hikmah NY	pelaksana	P	085752009005	
29	Siti Amriah	penanggung jawab	P		
30	Lada . F	pelaksana	P		
31	A. Aisyah	pelaksana	P		
32	Doni Lura Fioni	staff PDKP	P		

No.	Nama	Jabatan	P/L	No.HP Yang Bisa Dihubungi	Tanda Tangan
33	Mahdi Hamid	Ketg. Umum	L		
34	Erida. P	Kasi PK	P		
35	Ishawati	Kasi PIDK	P		
36	Ewang Ferd.	Kasi SDA & TTK	L		
37	E. Novita. F.	staf			
38	Qorrita AM	Staf Pelaksana			
39	Rina Fernandez. H	Staf Pemasangan	P		
40	LENNI. S.	Staff keu	P		
41	Rikta Sari	Staff PID	P		
42	SITI MARIAH	staf pelaksana	P		
43	MUMU DINI P.	Staf PPADK	P		

No.	Nama	Jabatan	P/L	No.HP Yang Bisa Dihubungi	Tanda Tangan
44	Prasetyo Adi.N.	staf Umum	L		
45	AKHMAD MAJHAN	Staf.	L		
46	ICFIND	- //	L		
47	Angga Amelia,S	Staf	P		
48	Vivawarni	Staf	P		
49	MISTRI ADI	Staf	L		
50	Muriyanto	Kasi Umum	L		
51	Nar Fathin	Kabid Pemasar	L		
52	Nip Mulkhan	promosi	L		
53	Pratiwi	Bm ortak	P		
54	Anetra	Sekda Binaan	L		



LAMPIRAN

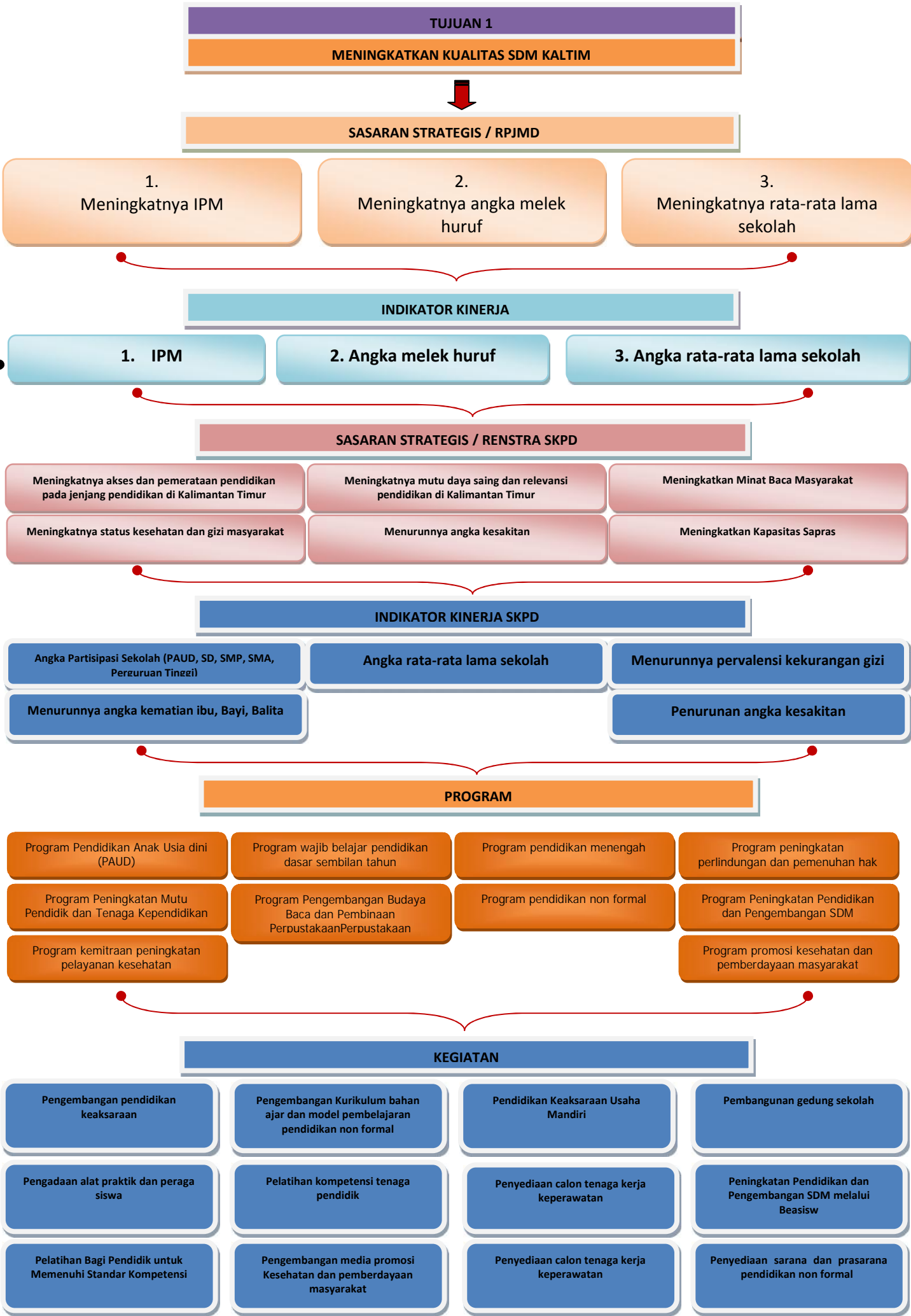
BAHAN PRESENTASI NARASUMBER

RPJMD

RENSTRA

MISI 1

“MEWUJUDKAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA KALTIM YANG MANDIRI DAN BERDAYA SAING TINGGI”



RPJMD

RENSTRA

MISI II

“MEWUJUDKAN DAYA SAING EKONOMI YANG BERKERAKYATAN BERBASIS SUMBER DAYA ALAM DAN ENERGI TERBARUKAN”

TUJUAN 2

MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN DAN PEMERATAAN PENDAPATAN MASYARAKAT

SASARAN STRATEGIS / RPJMD

4. Meningkatnya angka harapan hidup

5. Meningkatnya pendapatan per kapita

6. Menurunnya tingkat kemiskinan

7. Menurunnya tingkat pengangguran

8. Meningkatnya daya beli masyarakat

9. Menurunnya Indeks Gini

INDIKATOR KINERJA

4. Angka harapan hidup

5. Pendapatan per kapita

6. Tingkat kemiskinan

7. Tingkat pengangguran

8. Tingkat inflasi

9. Paritas daya beli

10. Indeks Gini

SASARAN STRATEGIS / RENSTRA SKPD

Meningkatnya status kesehatan dan gizi masyarakat dan menurunnya angka kesakitan

Meningkatnya kualitas hubungan industrial

Menurunkan jumlah pengangguran

Meningkatnya mutu daya saing dan relevansi pendidikan di Kalimantan Timur

Meningkatkan kualitas hidup PMKS

Mendorong penurunan tingkat kemiskinan perempuan

Meningkatnya Produksi dan Produktivitas Tanaman Pangan dan Hortikultura

Meningkatnya Jumlah Wirausaha Baru

Meningkatnya Kinerja Kelembagaan dan Usaha Koperasi dan UMKM

Meningkatnya pemenuhan kebutuhan masyarakat terhadap produk pangan asal ternak

Terwujudnya partisipasi dan peran aktif pemuda dan pramuka di berbagai bidang pembangunan

Terwujudnya sistem distribusi yang efisien

INDIKATOR KINERJA SKPD

Menurunnya prevalensi kekurangan gizi

Menurunnya angka kematian ibu, bayi, Balita

Penurunan angka kesakitan

Persentase Penyelesaian Kasus Hubungan Industrial

Tingkat penganggur terbuka

Prosentase perempuan miskin yg memiliki usaha ekonomi produktif

Menurunnya jumlah Penyadang Masalah Kesejahteraan Sosial

Prosentase perempuan miskin yg memiliki usaha ekonomi produktif

Produktivitas padi

Persentase Ketersediaan Lokal Daging

Berkurangnya rumah tidak layak huni bagi masyarakat tidak mamou

Persentase Penyerapan Tenaga Kerja dan Investasi Sektor Koperasi dan UMKM

Penumbuhan jumlah WUB

Pemuda dan pramuka yang memperoleh peningkatan kualitas SDM

Disparitas Harga Antarwilayah

Persentase Sumbangan PDRB Sektor Koperasi dan UMKM

PROGRAM

Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular

Program standarisasi pelayanan kesehatan

Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin

Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga

Program Penanggulangan Kemiskinan bidang Kesehatan

Program Penanggulangan Kemiskinan bidang Kesejahteraan Sosial

Program Beras untuk Keluarga Miskin

Program Penanggulangan Kemiskinan Bidang Peternakan

Program peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja

Program pengendalian dan evaluasi hasil pelaksanaan pembangunan

Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri

Program Penguatan Koordinasi Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID)

KEGIATAN

Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular

Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesehatan

Kemitraan pelayanan kesehatan bagi pasien kurang mampu

Fasilitasi Penyelesaian Prosedur, Penyelesaian Perselisihan HI

Peningkatan Pengawasan, Perlindungan dan Penegakkan

Pemberian beasiswa bagi siswa miskin

Peningkatan kualitas pelayanan sarana dan prasarana rehabilitasi

Fasilitasi penyaluran Raskin

Demplot kawasan usaha agribisnis terpadu

Pelatihan keterampilan pengembangan budidaya ternak

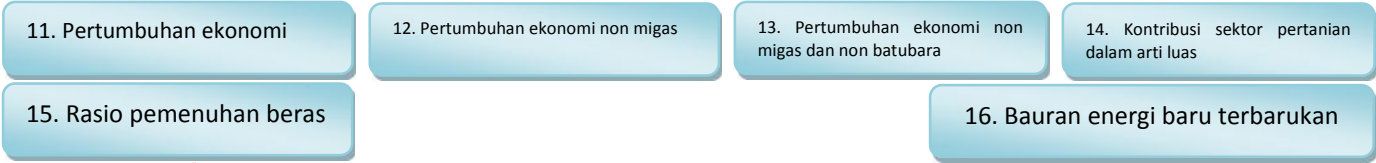
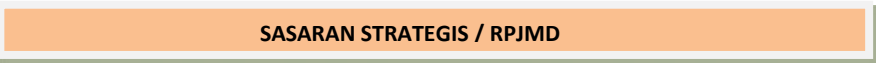
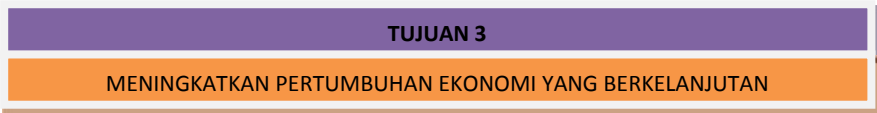
Fasilitasi dan Stimulasi Pembangunan Perumahan

Penyelenggaraan promosi produk Usaha Mikro kecil Menengah

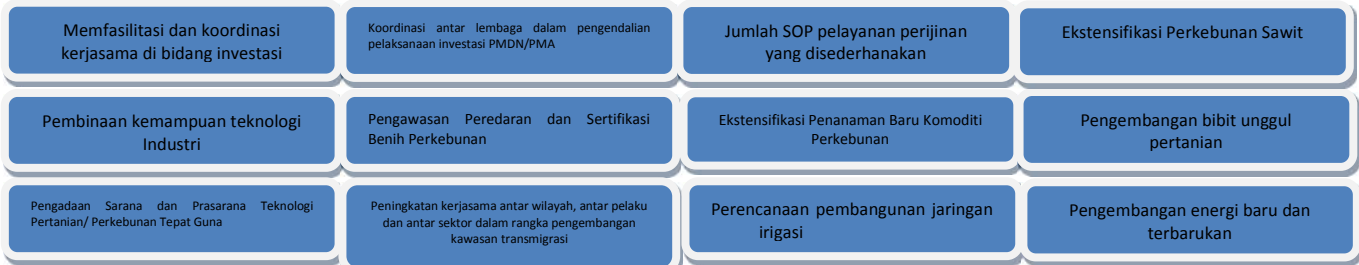
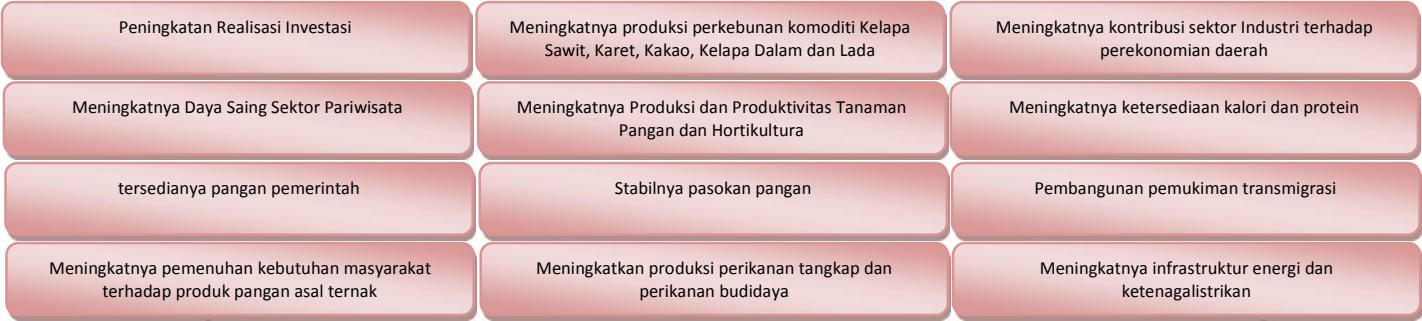
MISI II

“MEWUJUDKAN DAYA SAING EKONOMI YANG BERKERAKYATAN BERBASIS SUMBER DAYA ALAM DAN ENERGI TERBARUKAN”

RPJMD



RENSTRA



MISI III

“MEWUJUDKAN INFRASTRUKTUR DASAR YANG BERKUALITAS BAGI MASYARAKAT SECARA MERATA”

RPJMD

TUJUAN 4

MENYEDIKAN INFRASTRUKTUR DASAR YANG BERKUALITAS



SASARAN STRATEGIS / RPJMD

14.

Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan infrastruktur dasar

INDIKATOR KINERJA

17. Indeks kepuasan layanan infrastruktur dasar

SASARAN STRATEGIS / RENSTRA SKPD

Peningkatan kualitas jalan eksisting pada kawasan produktif ke kawasan distribusi

Terwujudnya jembatan yang menghubungkan antar kawasan

Meningkatnya infrastruktur SDA (waduk, embung, danau dan lain lain) bagi pengembangan kawasan pertanian.

Terwujudnya kemantapan jalan provinsi

Meningkatnya Jumlah Penumpang Yang Terlayani

Terwujudnya infrastruktur pengendali banjir serta mencegah intrusi air laut.

Mewujudkan jalan untuk meningkatkan daya saing investasi

Terwujudnya ketersediaan air baku Jumlah penduduk yang terlayani (604.800 penduduk)

Tersedianya infrastruktur bid Komunikasi & Informasi dalam pemenuhan kebutuhan akses informasi kepada masyarakat

INDIKATOR KINERJA SKPD

kualitas jalan provinsi

Terhubungnya jalan antar wilayah yang terputus

Peningkatan Luas daerah irigasi yang terlavani

Persentase terpeliharannya kondisi mantap ruas jalan

Prosentase pertumbuhan jumlah penumpang angkutan darat

Terbangunnya jalan tol

Persentase coverage area

jumlah debit air baku

Berkurangnya luas area daerah rawan banjir

Prosentase pertumbuhan jumlah penumpang pelabuhan laut

Prosentase pertumbuhan jumlah penumpang angkutan SDP

Persentase coverage area

PROGRAM

Program Pembangunan Jalan dan Jembatan

Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

Program peningkatan daya saing investasi sektor jalan dan jembatan

Program peningkatan daya saing investasi sektor transportasi darat, laut,

Program peningkatan daya saing investasi sektor transportasi darat, laut, udara dan ASDP

Program pembukaan keterisolasian wilayah sektor jalan dan jembatan

Program pembukaan keterisolasian wilayah sektor transportasi darat,

Program pembukaan keterisolasian wilayah sektor transportasi udara

Program sarana dan prasarana telekomunikasi

Program Penyediaan dan pengelolaan air baku

Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah.

Program peningkatan daya saing sektor sumberdaya air

Program pengendalian banjir

Program pengembangan pengelolaan dan konservasi sungai, danau dan

KEGIATAN

Penyediaan Jalan dengan Kapasitas Daya Mampu diatas 10 Ton (%)

jalan tol

Kuantitas Komoditas (ton)

Kuantitas Penumpang

Jumlah kecamatan yang belum terakses sarana dan prasarana

Jumlah kecamatan yang belum terakses sarana dan prasarana transportasi darat,

Jumlah kecamatan yang belum terakses sarana dan prasarana transportasi udara

Ibukota kecamatan yang terlayani jaringan telekomunikasi (%)

Kapasitas air baku

Cakupan Layanan Air Minum (

Luas genangan banjir (Ha)

Jumlah Daerah Aliran Sungai Kritis (DAS)

RENSTRA

MISI IV

“MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL, TRANSPARAN DAN BERORIENTASI PADA PELAYANAN PUBLIK”

RPJMD

TUJUAN 5

MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK



SASARAN STRATEGIS / RPJMD

15.

Terwujudnya pemerintahan yg bersih & bebas KKN

16.

Terwujudnya Peningkatan kualitas pelayanan public

17.

Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja

INDIKATOR KINERJA

18. Indeks persepsi korupsi

21. Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Daerah

20. Indeks kepuasan

22. Kinerja Pemerintahan Daerah

19. Opini BPK

SASARAN STRATEGIS / RENSTRA SKPD

Menurunnya kasus dan penyimpangan yang terjadi dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Meningkatnya Laporan Pengelolaan Keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur sesuai Standar

Terwujudnya kualitas pelayanan Publik yang prima, cepat, pasti, murah, transparan, adil , patut dan

Meningkatnya Kualitas SDM Aparatur Sipil Negara (ASN)

Terwujudnya instansi pemerintah yang akuntabel

Meningkatnya kualitas LPPD

Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pemilu dan meningkatkan kualitas demokrasi

Meningkatnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah berdasarkan hasil audit dan evaluasi

INDIKATOR KINERJA SKPD

Persentase penyelesaian pengaduan masyarakat yang ditangani

Jumlah SKPD yang ditetapkan sebagai ZI menuju WBK/WBBM

Opini atas Laporan Keuangan

Persentase Jumlah aparatur yang memiliki tupoksi sesuai dengan kompetensi/

Survei Kepuasan Masyarakat

Prosentase SKPD yang Akuntabilitasnya baik (B)

Prosentase Kabupaten/Kota yang Akuntabilitasnya baik (B)

Predikat LPPD

partisipasi masyarakat dalam pemilu

Indeks Demokrasi Indonesia (IDI)

Persentase capaian kinerja SKPD sesuai Tupoksi dan Perjanjian Kinerja

Skor rata-rata hasil evaluasi akuntabilitas kinerja SKPD

Persentase LPPD Kab/Kota yang mendapat nilai sangat tinggi

PROGRAM

Program pengembangan zona integritas

Program pencegahan dan pemberantasan KKN

Program Pengelolaan Keuangan Daerah

Program Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah

Program peningkatan pelayanan publik

Program peningkatan kualitas manajemen berbasis kinerja

Peningkatan Kinerja Pemerintahan Daerah

Program Pendidikan politik masyarakat

KEGIATAN

Penerapan Zona Integritas pada SKPD

Penanganan pengaduan masyarakat

Pemeriksaan dengan tujuan tertentu/khusus

Asistensi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Evaluasi rancangan peraturan daerah tentang APBD kabupaten/kota

Penerapan Survey Indeks Kepuasan Masyarakat

Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)

Pengembangan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)

Evaluasi LPPD Kab/Kota

Penyuluhan kepada masyarakat

Pemeriksaan Kinerja SKPD

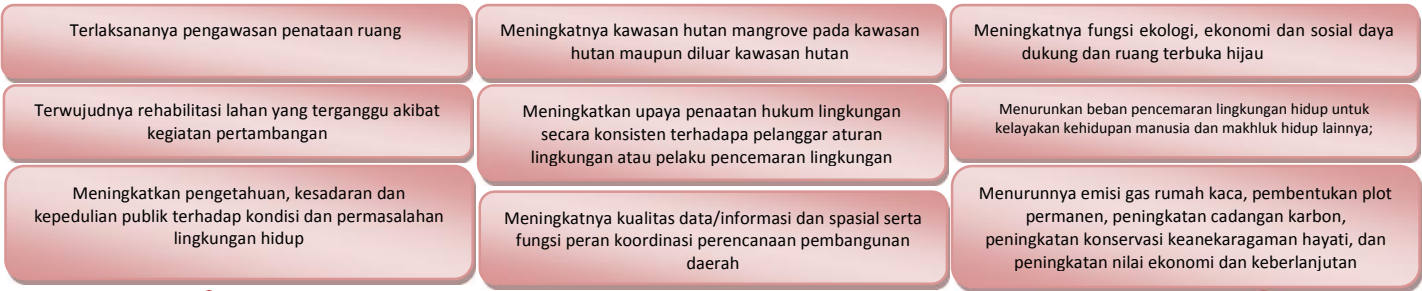
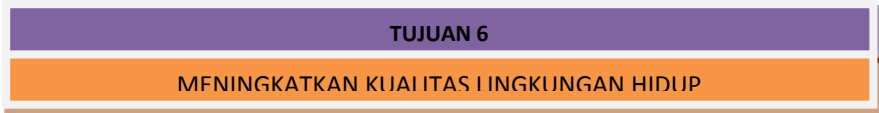
Reformasi pelayanan sektor publik

RENSTRA

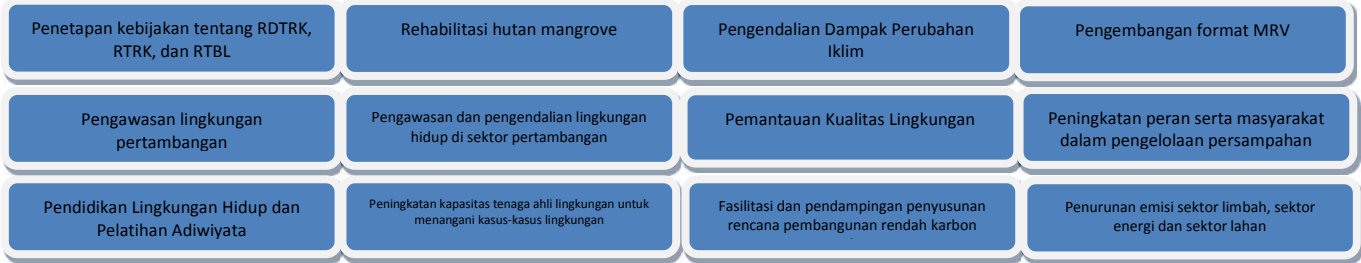
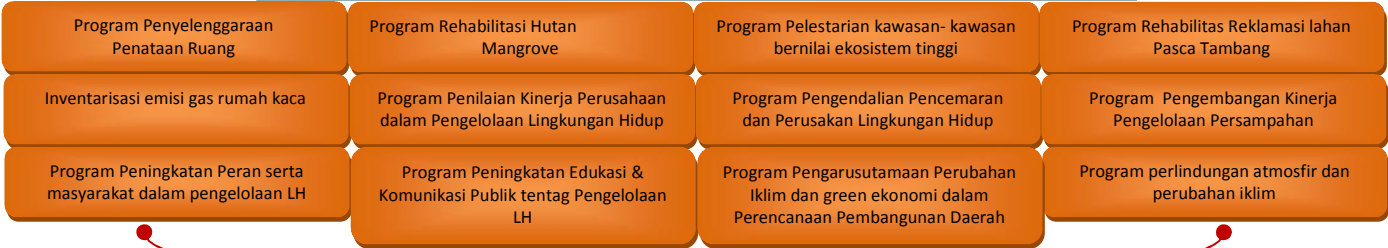
MISI V

“MEWUJUDKAN KUALITAS LINGKUNGAN YANG BAIK DAN SEHAT SERTA BERPERSPEKTIF PERUBAHAN IKLIM”

RPJMD



RENSTRA





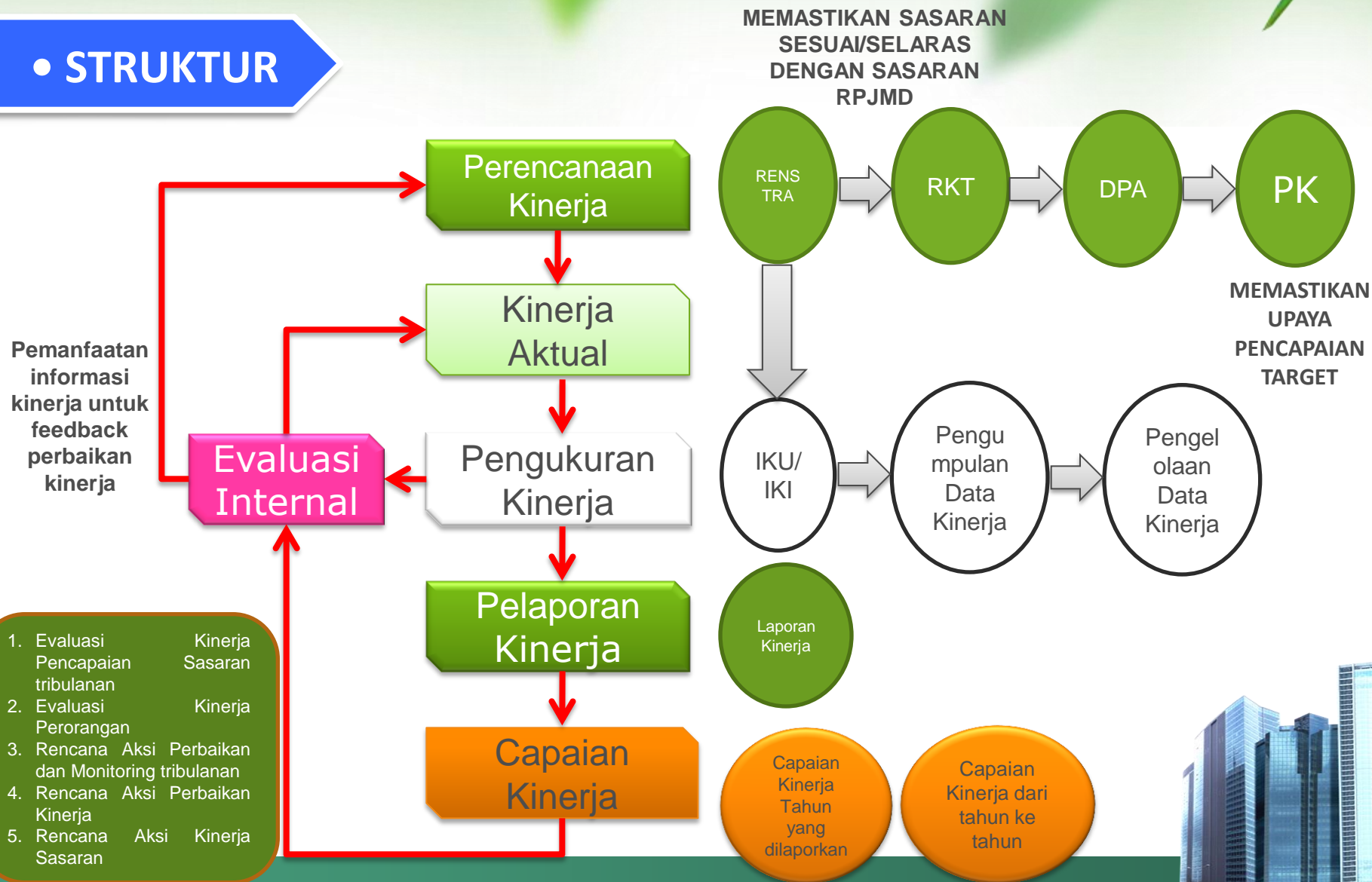
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah



SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

SAKIP

• STRUKTUR



MENINGKATKAN KUALITAS PENDIDIKAN MASYARAKATSEHINGGA BISA BERSAING DI ERA GLOBAL

MISI

• FRAMEWORK



PROGRAM



Kerangka Arsitektur Program, Kegiatan dan Kinerja

Struktur

Jabatan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
Kepala Dinas	SASARAN STRATEGIS PD	IK SASARAN STRATEGIS	
	Meningkatnya prestasi siswa dan lembaga sekolah bidang akademis maupun non akademis	Angka melanjutkan dari SD / MI ke SMP / MTS	94,84%
		Angka partisipasi kasar SD / MI	99,63%
		Angka partisipasi kasar SMP / MTS	94,01%
Kepala Bidang SD & PKLK, SMP, SMA & SMK	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	
	Meningkatnya angka melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTS	Angka melanjutkan dari SD / MI ke SMP / MTS	94,84%
	Meningkatnya angka partisipasi kasar SD/MI	Angka partisipasi kasar SD / MI	99,63%
	Meningkatnya angka partisipasi kasar SMP/MTS	Angka partisipasi kasar SMP / MTS	94,01%
Kepala Seksi KURIKULUM, SAPRAS BIDANG SD & PLK, SMP, SMA & SMK	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	
	Meningkatnya jumlah siswa baru TK. 1 jenjang SMP / MTS	Jumlah siswa baru TK. 1 jenjang SMP / MTS	14.200
	Meningkatnya jumlah siswa SD/MI	Jumlah siswa SD/MI	82.400
	Meningkatnya jumlah siswa SMP / MTS	Jumlah siswa SMP / MTS	43.250

CROSS CUTTING SASARAN RPJMD

• STRUKTUR



CROSS CUTTING PROGRAM RENSTRA

RENSTRA

• STRUKTUR

Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun

Program Pendidikan Menengah

Angka Melanjutkan dari SD / MI ke SMP / MTS

Pelaksanaan Penerimaan Siswa Baru Tahun Ajaran 2015/2016

Angka Partisipasi Kasar SD / MI & SMP / MTS

Penyedia Sarana Sekolah Bagi Siswa Siswi SMP Terbuka

Peningkatan Akademis Pada Pusat Layanan Autis

Pendampingan Pendidikan Inklusif

Try Out Sekolah Dasar

ANGKA MELANJUTKAN DARI SD / MI KE SMP / MTS

Penyelenggaraan Ujian Sekolah SD / MI / PK

Pengadaan Sarana Prasarana Pendidikan SD

Pengadaan Sarana Prasarana Pendidikan SMP

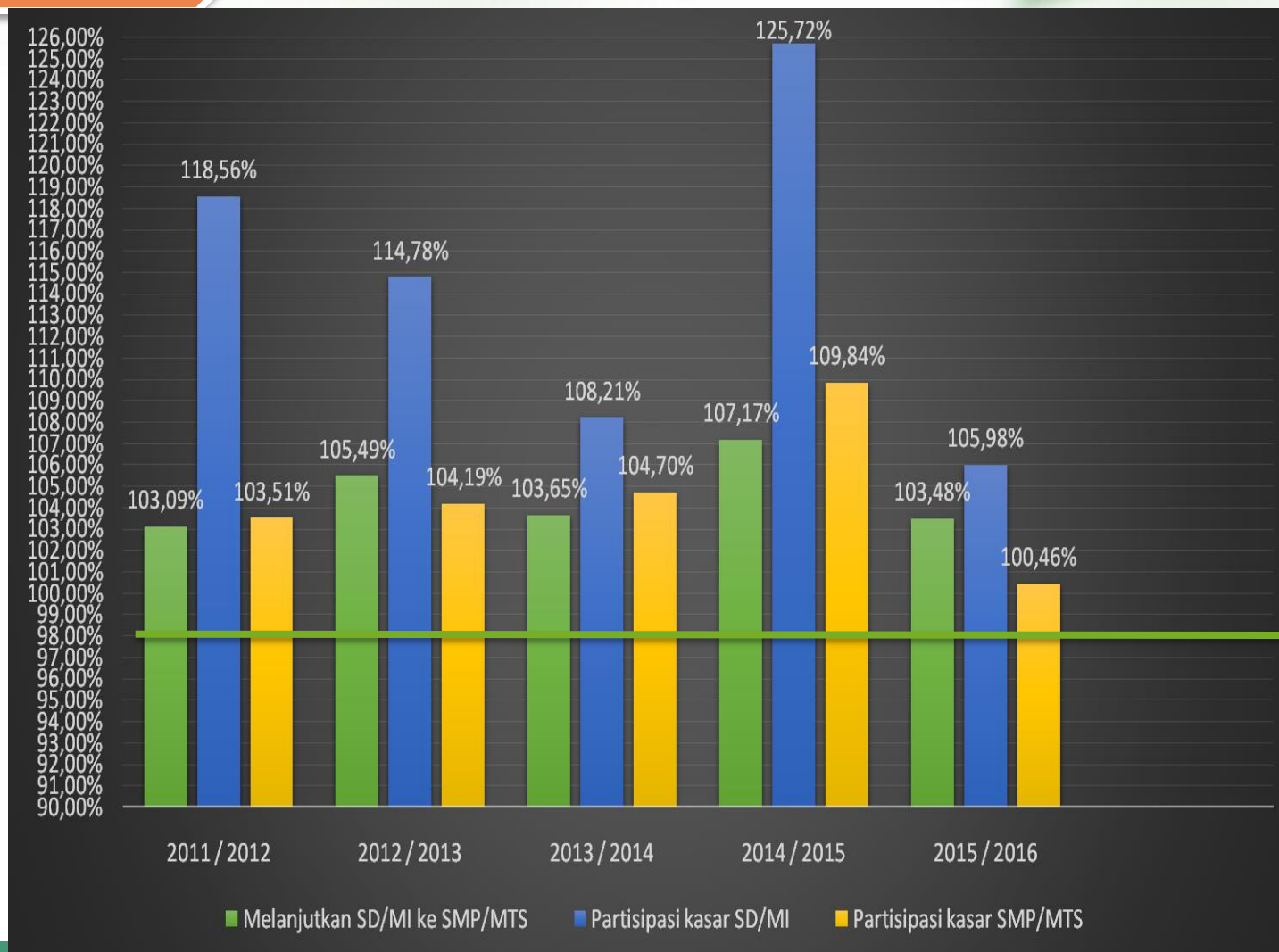
Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Menengah Pertama (SMP)

Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar (SD)



CAPAIAN INDIKATOR KINERJA (5) LIMA TAHUN TERAKHIR

• GRAFIK



RENCANA KINERJA TAHUNAN

RKT

TAHUN 2018

Sasaran Strategis				Program/Kegiatan			Pagu	Ket.
No.	Uraian	Indikator Kinerja	Target	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Meningkatnya Prestasi Siswa dan lembaga sekolah-bidang akademis maupun non akademis	Angka Melanjutkan Dari SD/MI ke SMP/MTs	95,84%	Program Pendidikan Sekolah Dasar				
				Pengadaan Sarana Prasarana Sekolah Dasar (SD)	Jumlah Pengajuan sarana SD yang terpenuhi	383	3.210.000.000,00	
				Penyelenggaraan Try Out Sekolah Dasar	Jumlah Siswa yang siap mengikuti Ujian nasional	14.027	340.000.000,00	
				Penyelenggaraan Ujian Sekolah Dasar (SD)	Jumlah Siswa yang lulus ujian nasional	14.027	480.000.000,00	
				Penyediaan biaya Operasional Sekolah Dasar (SD) Negeri	Jumlah Lembaga yang menerima bantuan	165	42.928.374.000,00	
				Program Pendidikan Sekolah Menengah Pertama				
				Pengadaan Sarana Prasarana Sekolah Menengah Pertama (SMP)	Jumlah Pengajuan sarana SMP yang terpenuhi	540	2.187.200.000,00	
				Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Daerah (SMP) Negeri	Jumlah lembaga yang menerima bantuan	27	28.037.520.000,00	
				Pelaksanaan Penerimaan Siswa baru Sekolah Menengah Pertama (SMP)	Jumlah siswa yang melanjutkan ke SMP melalui jalur online	7.500	255.000.000,00	
		Angka Partisipasi Kasar SD/MI	99,63%	Program Pendidikan Sekolah Dasar				
				Penyediaan sarana Sekolah bagi Siswa Prasejahtera SD	Jumlah siswa prasejahtera SMP yang mendapat bantuan sarana sekolah	700	200.000.000,00	
				Pembangunan Rehabilitasi Sedang/Berat Bangunan Sekolah Dasar (SD)	Jumlah lembaga yang direhabilitasi	33	11.830.231.330,00	
				Lomba Akademis dan Non Akademis Siswa Sekolah Dasar (SD)	Jumlah prestasi tingkat nasional	10	658.665.600,00	
		SMP/MTs	96,01%	Program Pendidikan Sekolah Menengah Pertama				
				Penyediaan sarana sekolah bagi siswa Prasejahtera SMP	Jumlah siswa prasejahtera SMP yang mendapat bantuan sarana sekolah	630	200.000.000,00	
				Pembangunan/Rehabilitasi Sedang/Berat Bangunan Sekolah menengah Pertama (SMP)	Jumlah lembaga yang direhabilitasi	10	2.000.000.000,00	
				Lomba Akademis dan Non akademis Siswa Sekolah Meengah Pertama (SMP)	Jumlah prestasi tingkat propinsi	10	525.000.000,00	

PENYELARASAN RENSTRA DAN RKT

RENSTRA

• SELARAS

Penyelarasan Renstra dan RKT

Sasaran										
No.	Uraian	Indikator Kinerja	Formula Perhitungan	Kondisi Th.2013	Target Tahun					Program
					2014	2015	2016	2017	2018	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Meningkatnya Prestasi Siswa dan lembaga sekolah-bidang akademis maupun akademis	Angka Melanjutkan	Jumlah siswa baru yang diterima dibagi jumlah lulusan pada jenjang sebelumnya dikali 100 persen	93,33%	93,84%	94,34%	94,84%	95,34%	95,84%	Program Pendidikan Sekolah Dasar
		Dari SD/MI ke SMP/MTs								Program Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
		Angka Partisipasi Kasar	Jumlah siswa dibagi jumlah penduduk usia sekolah di kali 100 persen	99,63%	99,63%	99,63%	99,63%	99,63%	99,63%	Program Pendidikan Sekolah Dasar
		- SD/MI - SMP/MTs		92,71%	93,01%	92,71%	94,01%	94,71%	95,01%	Program Pendidikan Sekolah Menengah Pertama



• BIDANG SD & PKLK; SMP, SMAK & SMK

Sasaran	Indikator Kinerja	Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target	Input (Rp.)
Meningkatkan prestasi siswa dan Lembaga sekolah Bidang akademis maupun non akademis	1 Angka Melanjutkan dari Jenjang SD/MI ke SMP/MTs	1 Program Pendidikan Sekolah Dasar	Try Out Sekolah Dasar	Jumlah siswa SD yang siap mental dalam menghadapi ujian nasional	12.253	150.000.000,00
			Try Out Kejuruan SD/MI	Jumlah siswa SD/MI yang siap mengikuti ujian nasional	14.000	105.000.000,00
			Penyelenggaraan Ujian Sekolah (SD/MI/PAK)	Jumlah siswa SD/MI yang lulus ujian sekolah	140.000	747.112.000,00
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendidikan SD	Jumlah lembaga yang diberi bantuan	63	3.102.811.000,00
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Olahraga SD	Jumlah lembaga yang diberi bantuan	5	120.541.000,00
			Penyediaan biaya operasional sekolah dasar (SD) Negeri	Jumlah siswa yang mendapat bantuan operasional sekolah	57.464	41.332.654.400,00
		2 Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Try Out Sekolah Menengah Pertama	Jumlah siswa SMP yang siap Mengikuti ujian nasional	135.000	121.250.000,00
			Try Out SMP	Jumlah siswa SMP/MTs yang siap mental dalam menghadapi ujian nasional	12.800	149.600.000,00
			Pelaksanaan ujian SMP	Jumlah siswa lulus ujian sekolah	11.000	100.000.000,00
			Pelaksanaan Penerimaan siswa baru Sekolah Menengah Pertama Tahun Ajaran 2017/2018	Jumlah siswa baru tingkat 1 yang diterima di SMP	7.500	199.500.000,00
			Penyediaan Biaya operasional Sekolah Dasar (SMP) Negeri	Jumlah siswa yang mendapat bantuan operasional sekolah	22.432	28.445.500.000
			Pengadaan Meubelair SMP	Jumlah Pengajuan meubelair yang terpenuhi	884	8.338.800.000
			Pengadaan Sarana Prasarana SMP (Komputer server)	Jumlah Pengajuan sarana prasarana yang terpenuhi	202	2.394.500.000

Sasaran	Indikator Kinerja	Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target	Input (Rp.)	
	Angka 2Partisipasi Kasar SD/MI/SMP/MTs	3Program Pendidikan Sekolah Dasar	Penyediaan sarana sekolah bagi siswa prasejahtera SD	Jumlah siswa yang diberikan bantuan	1.000	234.212.000	
			Pembangunan Rehabilitasi sedang/berat gedung SD	Jumlah lembaga yang direhabilitasi	39	10.041.388.500	
			Olimpiade MIPA SD/MI	Jumlah juara tingkat provinsi	400	128.200.000	
			Minat bakat dan kreativitas SD/MI/PK	Jumlah juara tingkat provinsi	220	312.351.000	
			Olimpiade olahraga siswa nasional (Q29N) SD/MI	Jumlah juara tingkat provinsi	225	256.879.000	
			Minat bakat kreativitas Pendidikan Agama Jenjang SD	Jumlah juara tingkat provinsi	150	96.900.000	
			4Program Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Penyediaan sarana sekolah bagi siswa Prasejahtera SMP			
		Pembangunan/Rehabilitasi sedang/berat bangunan SMP				8	1.426.500.000
		Lomojari SMP Terbuka		Jumlah juara tingkat provinsi	3	120.000.000	
		Pembinaan Prestasi Siswa untuk olimpiade		Jumlah juara tingkat provinsi	12	149.500.000	
		Minat Bakat dan kreativitas SMP/MTs		Jumlah juara tingkat provinsi	12	149.500.000	
		Lomba Penelitian karya ilmiah (LPIR) SMP		Jumlah juara tingkat provinsi	1	300.000.000	

Pembahasan

Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Formulasi Perhitungan/Penjelasan	Penanggung Jawab	Sumber Data
1 Meningkatkan prestasi siswa dan lembaga sekolah bidang akademis maupun non akademis	1 Angka Lulusan - SD/MI - SMP/MTs - SMA/MA/SMK	Jumlah siswa lulus dibagi jumlah siswa mengikuti ujian nasional dikali 100 persen	Bidang SD & PKLK dan Bidang SMP, SMA & SMK	Data Individu Sekolah Dapodik
	2 Angka Putus Sekolah - SD/MI - SMP/MTs - SMA/MA/SMK	Jumlah siswa putus sekolah dibagi jumlah siswa dikali 100 persen	Bidang SD & PKLK dan Bidang SMP, SMA & SMK	Data Individu Sekolah Dapodik
	3 Angka Melanjutkan Dari SD/MI ke - SMP/MTs - Dari SMP/MTs ke SMA/MA/SMK	Jumlah siswa baru yang diterima dibagi jumlah lulusan pada jenjang sebelumnya dikali 100 persen	Bidang SD & PKLK dan Bidang SMP, SMA & SMK	Data Individu Sekolah Dapodik
	4 Rata-rata Nilai Ujian Nasional/Sekolah - SD - SMP	Jumlah nilai ujian dibagi jumlah siswa	Bidang SD & PKLK dan Bidang SMP, SMA & SMK	Data Individu Sekolah Dapodik
	5 Persentase anak usia sekolah dari keluarga prasejahtera yang lulus sekolah sampai dengan SMP/MTs	Jumlah anak usia sekolah dari keluarga prasejahtera yang lulus sekolah sampai dengan SMP/MTs dibagi jumlah seluruh anak usia sekolah sampai dengan SMP/MTs dari Keluarga prasejahtera dikali 100 persen	Bidang SD & PKLK dan Bidang SMP, SMA & SMK	Data Individu Sekolah Dapodik



Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Formulasi Perhitungan/Penjelasan	Penanggung Jawab	Sumber Data
	6 Angka partisipasi Murni - SD/MI - SMP/MTs	Jumlah siswa usia sekolah dibagi jumlah penduduk usia sekolah dikali 100 persen	Bidang SD & PKLK dan Bidang SMP, SMA & SMK	Data Individu Sekolah Dapodik
	7 Angka Partisipasi Kasar - SD/MI - SMP/MTs	Jumlah siswa dibagi jumlah penduduk usia sekolah dikali 100 persen	Bidang SD & PKLK dan Bidang SMP, SMA & SMK	Data Individu Sekolah Dapodik
	8 Persentase Satuan Pendidikan yang memenuhi SPM - SD/MI - SMP/MTs	Jumlah satuan pendidikan memenuhi SPM dibagi jumlah seluruh satuan pendidikan dikali 100 persen	Bidang SD & PKLK dan Bidang SMP, SMA & SMK	Data Individu Sekolah Dapodik
	9 Persentase Satuan Pendidikan Berakreditasi A - SD - SMP	Jumlah satuan Pendidikan Berakreditasi A dibagi jumlah satuan Pendidikan dikali 100%	Bidang SD & PKLK dan Bidang SMP, SMA & SMK	Data Individu Sekolah Dapodik
	10 Jumlah Prestasi - SD - SMP	Jumlah prestasi dibidang akademik dan non akademik yang diraih lembaga atau perorangan tingkat provinsi, nasional dan internasional	Bidang SD & PKLK dan Bidang SMP, SMA & SMK	Data penerima BOSDA
2 Meningkatnya kualitas dan kuantitas tenaga pendidik	1 Rasio Guru/Murid per kelas - SD/MI - SMP/MTs - SMA/MA/SMK	Jumlah guru per kelas dibagi jumlah Murid	Bidang SD & PKLK Bidang SMP, SMA & SMK Bidang Fungsional Kependidikan	Data Individu Sekolah Dapodik
	2 Persentase guru yang telah memiliki sertifikat pendidik	Jumlah guru yang telah memiliki sertifikat pendidik dibagi jumlah seluruh guru dikali 100%	Bidang Fungsional Kependidikan	Data Individu Sekolah Dapodik

Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Formulasi Perhitungan/Penjelasan	Penanggung Jawab	Sumber Data
3 Meningkatnya akses pendidikan non formasi dan informal serta pendidikan luar sekolah	1APK PAUD	Jumlah peserta PAUD dibagi jumlah anak usia 0-6 tahun dikali 100%	Bidang PNFI	Data Individu Sekolah Dapodik
	2Angka Melek Huruf	$100\% - \frac{(\text{Jumlah Buta Aksara})}{(\text{Jumlah Penduduk Usia 15-45 Thn})} \times 100\%$	Bidang PNFI	BPS, Data KF
4 Meningkatnya kualitas layanan pendidikan	1Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	Nilai SKM	Semua bidang Sekretariat	Nilai SKM

• KABID SD & PKLK

Sasaran Program	Indikator Kinerja	Formulasi Perhitungan/Penjelasan	Sumber Data
Meningkatnya angka melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTS	Angka melanjutkan dari SD / MI ke SMP / MTS	Jumlah siswa baru yang diterima dibagi jumlah lulusan pada jenjang sebelumnya	Data Individu Sekolah, Dapodik
Meningkatnya angka partisipasi kasar SD/MI	Angka partisipasi kasar SD / MI	Jumlah siswa dibagi jumlah penduduk usia sekolah dikali 100%	Data Individu Sekolah, Dapodik
Meningkatnya angka partisipasi kasar SMP/MTS	Angka partisipasi kasar SMP / MTS	Jumlah siswa dibagi jumlah penduduk usia sekolah dikali 100%	Data Individu Sekolah, Dapodik



KASI SARANA DAN PRASARANA BIDANG SD & PKLK

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Formulasi Perhitungan/Penjelasan	Sumber Data
Meningkatnya jumlah siswa baru TK. 1 jenjang SMP / MTS	Jumlah siswa baru TK. 1 jenjang SMP / MTS	Jumlah siswa baru TK. 1 jenjang SMP / MTS	Dapodik
Meningkatnya jumlah siswa SD/MI	Jumlah siswa SD/MI	Jumlah siswa SD/MI	Dapodik
Meningkatnya jumlah siswa SMP / MTS	Jumlah siswa SMP / MTS	Jumlah siswa SMP / MTS	Dapodik



CASCADING INDIKATOR KINERJA UTAMA

IKU

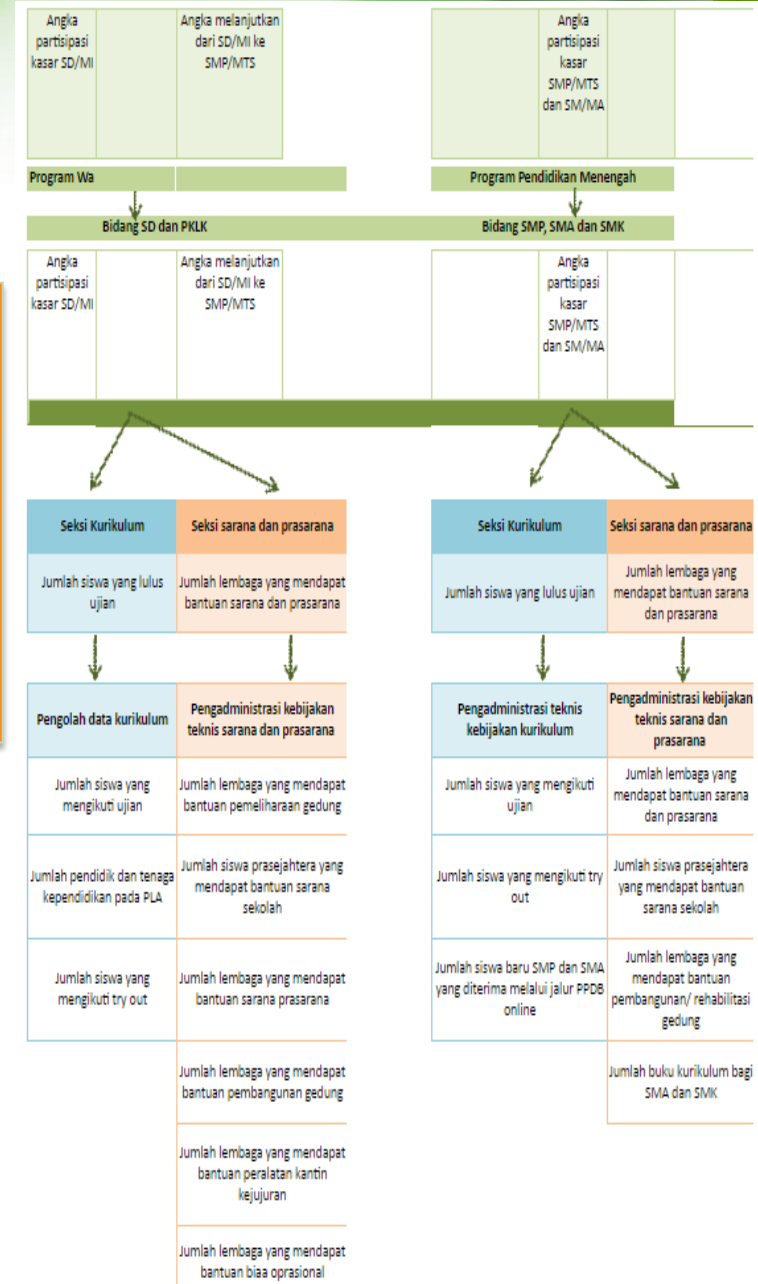
• CASCADING

Tujuan : Terwujudnya pendidikan Kota yang berkualitas dan terjangkau bagi masyarakat

Sasaran 1 : Meningkatnya prestasi siswa dan lembaga sekolah bidang akademis maupun non akademis

IKU 3 : Angka partisipasi kasar

IKU 5 : Angka melanjutkan



FORMULIR

Sasaran							
No.	Uraian	Indikator	Formula Penghitungan	Permintaan Data	Data Dasar	Realisasi	Program
1	2	3	4	5	6	7	8
	Meningkatnya prestasi siswa dan lembaga sekolah bidang akademis maupun non akademis	Angka 1 Melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTs	Jumlah siswa baru yang diterima dibagi jumlah lulusan pada jenjang sebelumnya dikali 100 persen	Jumlah siswa baru tingkat I jejang SMP/MTs	14.718	103,48	Prgram Pendidikan Menengah
				Jumlah siswa lulus SD/MI tahun sebelumnya	14.223		Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
		Angka Partipasi 2Kasar	Jumlah siswa dibagi jumlah penduduk usia sekolah dikali 100 persen	Jumlah siswa SD/MI	87.422	105,98	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
		SD/MI		Jumlah penduduk usia 7-12 tahun	82.487		
		SMP/MTs		Jumlah siswa SMP/MTs	45.231	104,37	
				Jumlah penduduk usia 13-15 tahun	43.339		

• KABID SMP, SMA & SMK

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7
1	Pelaksanaan Ujian Nasional SMP	Ujian Sekolah SMP berjalan dengan lancar	siswa	14.125	14.125	100,00
2	Try Out SMP	Terlaksananya try out jenjang SMP, MTs	siswa SMP, MTs	16.800	16.800	100,00
3	Pelaksanaan Penenerimaan peserta didik baru tahun ajaran 2015/2016	Tercapainya pelayanan PPDB yang prima	lembaga	60	60	100,00
4	Try out Sekolah Menengah	Terlaksananya Try out jejang SMA, SMK dengan lancar	siswa	19.450	19.450	100,00



KASI PADA BIDANG SD & PKLK

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7
A.	Program Pendidikan Wajib Belajar Sembilan Tahun					
B	Kegiatan					
1	Olimpiade olahraga siswa nasional (O2SN) SD/MI	Tersedianya diwa berprestasi di bidang olahraga	Cabor	9	9	100,00
2	Pembinaan evauasi diri sekolah	Peningkatan mutu Pendidikan SD	orang	210	210	100,00
3	Peningkatan Akademis pada Pusat layanan Autis	Kegiatan belajar mengajar bisa berjalan dengan baik	tenaga medis Manager guru terapis Ka.TU Tukang Kebun penjaga lembaga	4 1 20 1 2 2 46	4 1 20 1 2 2 46	100,00
4	Pembangunan/Rehabiltias Sedang/berat Gedung SD	Sarana Prasarana Pendidikan yang memadai	lembaga	46	46	100,00

KINERJA & ANGGARAN

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Capaian Anggaran (%)	Program	Kegiatan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatnya Prestasi Siswa dan lembaga sekolah bidang akademis maupun non akademis	Angka Melanjutkan Dari SD/MI ke SMP/MTs	94,84	103,48	109,11	99,04	1Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Pengadaan Sarana Prasarana Pendidikan SD Pengadaan Sarana dan Prasarana SMP -Try out Sekolah Dasar Penyelenggaraan Ujian Sekolah (SD/MI/PK) Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Daerah (SD) Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Daerah (SMP)
		Angka Partisipasi Kasar					2Program Pendidikan Menengah	-Pelaksanaan Penerimaan Siswa baru Tahun ajaran 2015/2016
		aSD/MI bSMP/MTs	99,63 94,01	105,98 100,46	106,38 106,86	74,33	3Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Pendampingan Pendidikan Inklusif Peningkatan Akademis pada Pusat Layanan Autis Penyediaan Sarana Sekolah Bagi siswa Siswi SMP Terbuka

Evaluasi dan Monitoring Kinerja Pencapaian Sasaran

. RENAKSI

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Permasalahan	Analisa	Saran	Rencana Aksi			Monitoring Tindak Lanjut
								Langkah Kerja	Output	Waktu	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Meningkatnya Prestasi Siswa dan lembaga sekolah bidang akademis maupun non akademis	1 Angka lulusan aSD/MI	100,00	100,00	100,00							
	bSMP/MTs	100,00	100,00	100,00							
	cSMA/MA/SMK	99,54	98,52	98,98	Siswa tidak mampu mencapai passing grade kelulusan	Kecilnya persentase yang tidak lulus, menunjukkan bahwa faktor individual menjadi penyebabnya, seperti kenakalan remaja, paradigma belum pentingnya pendidikan	Agar dilakukan monitoring dan pendekatan terhadap siswa yang menunjukkan indikasi yang mengarah kepada kegagalan	Mengusulkan penguatan sistem moniotring dan konselor profesional	surat usulan	2017	Telah disusun surat dimaksud
	Angka Partisipasi 2 Murni										
	aSD/MI	88,97	82,79	93,05	Terdapat penduduk usia sekolah yang tidak bersekolah maupun yang belum bersekolah	Mereka yang tinggal di pinggiran kota, lebih efektif menempuh pendidikan di sekolah/pondok pesantren yang paling mudah aksesnya meskipun di luar wilayah	Agar pemerataan akses pendidikan terhadap masyarakat	Mengusulkan peningkatan kapasitas pendidikan	surat usulan	2017	Telah disusun surat dimaksud
	bSMP/MTs	70,00	62,99	89,99							
	cSMA/MA/SMK	64,75	58,66	90,59							
	Angka partisipasi 3 Kasar				Banyaknya siswa yang dari luar yang menjadi peserta didik	yang baik menjadi daya tarik warga disekitar untuk menempuh pendidikan	Agar peningkatan pendidikan	Mengusulkan peningkatan kapasitas pendidikan	surat usulan	2017	Telah disusun surat dimaksud
	aSD/MI	100,00	95,86	95,86							
	bSMP/MTs	94,01	85,13	90,55							
	cSMA/MA/SMK	92,00	84,07	91,38							
	Angka Melanjutkan Dari SD/MI ke aSMP/MTs	94,84	104,99	110,71	Banyaknya masyarakat luar yang menyekolahkan anaknya terutama pada jenjang SMK	Kualitas hasil didik jenjang lanjutan dipandang lebih baik yang dibuktikan dengan prestasi siswa	Agar peningkatan pendidikan	Melakukan kajian terhadap tantangan dan daya dukung pendidikan lanjutan dan rencana pengembangannya	Dokumen Kajian	2017	Telah disusun kajian dimaksud
	bDari SMP/MTs ke SMA/MA/SMK	99,94	137,71	137,79							

• LAPORAN

Sasaran Strategis	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Target				Satuan	Realisasi	Realisasi Tahun 2016			
				TW I	TW II	TW III	TW IV			TW I	TW II	TW III	TW IV
Meningkatnya Prestasi Siswa dan lembaga sekolah bidang akademis maupun non akademis	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Jumlah siswa yang diberi bantuan	57.464	14.366	28.732	43.098	57.464	Siswa	57.464	14.366	28.732	43.098	57.464
		Penyediaan biaya operasional sekolah dasar (SD)											
		Penyelenggaraan ujian sekolah (SD/MI/PK)	57.464	0	2	2	4	peserta	57.464	0	2	2	4
		Jumlah Peserta Ujian Sekolah (SD/MI/Pk)											
		Peningkatan Akademis pada pusat layanan Autis	31	0	0	31	31	orang	31	0	0	31	31
		Pengadaan Sarana Prasarana Pendidikan SD	63	5	35	50	63	lembaga	63	5	35	50	63
		Pendampingan Pendidikan Inklusif	100	25	50	75	100	orang	100	25	50	75	100
		Try out Sekolah Dasar	57.464	2	2	2	4	siswa	57.464	2	2	2	4
		Pengadaan sarana prasarana SMP	262	65	130	195	262	lembaga	262	65	130	195	262
		Penyediaan biaya operasional sekolah Dasar (SMP)	22.432	5.608	6	4	2	siswa	22.432	5.608	6	4	2
		Pengadaan Meubelair SMP	884	0	884	884	884	unit	884	0	884	884	884
		Penyediaan sarana sekolah bagi siswa SMP Terbuka	700	0	700	700	700	siswa	700	0	700	700	700
	2Program Pendidikan Menengah												
		Pelayanan Penerimaan Peserta didik baru yang prima dan akuntabel	60	0	60	60	60	lembaga	60	0	60	60	60



Terima Kasih



The background of the slide features a stylized, light gray line-art illustration of a city skyline. Several skyscrapers of varying heights and architectural styles are visible, including one with a prominent triangular roof. The illustration is positioned behind a large, solid orange rectangular area that serves as a backdrop for the title text.

PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH DAERAH

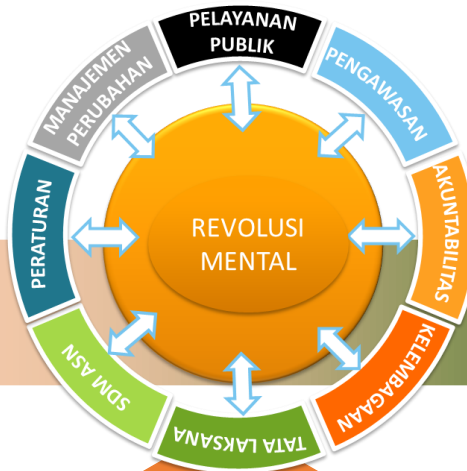
SASARAN REFORMASI BIROKRASI



pemerintahan belum bersih, kurang akuntabel dan berkinerja rendah

pemerintahan belum efektif dan efisien

pelayanan publik masih buruk



pemerintahan yang bersih, akuntabel dan berkinerja tinggi

pemerintahan yang efektif dan efisien

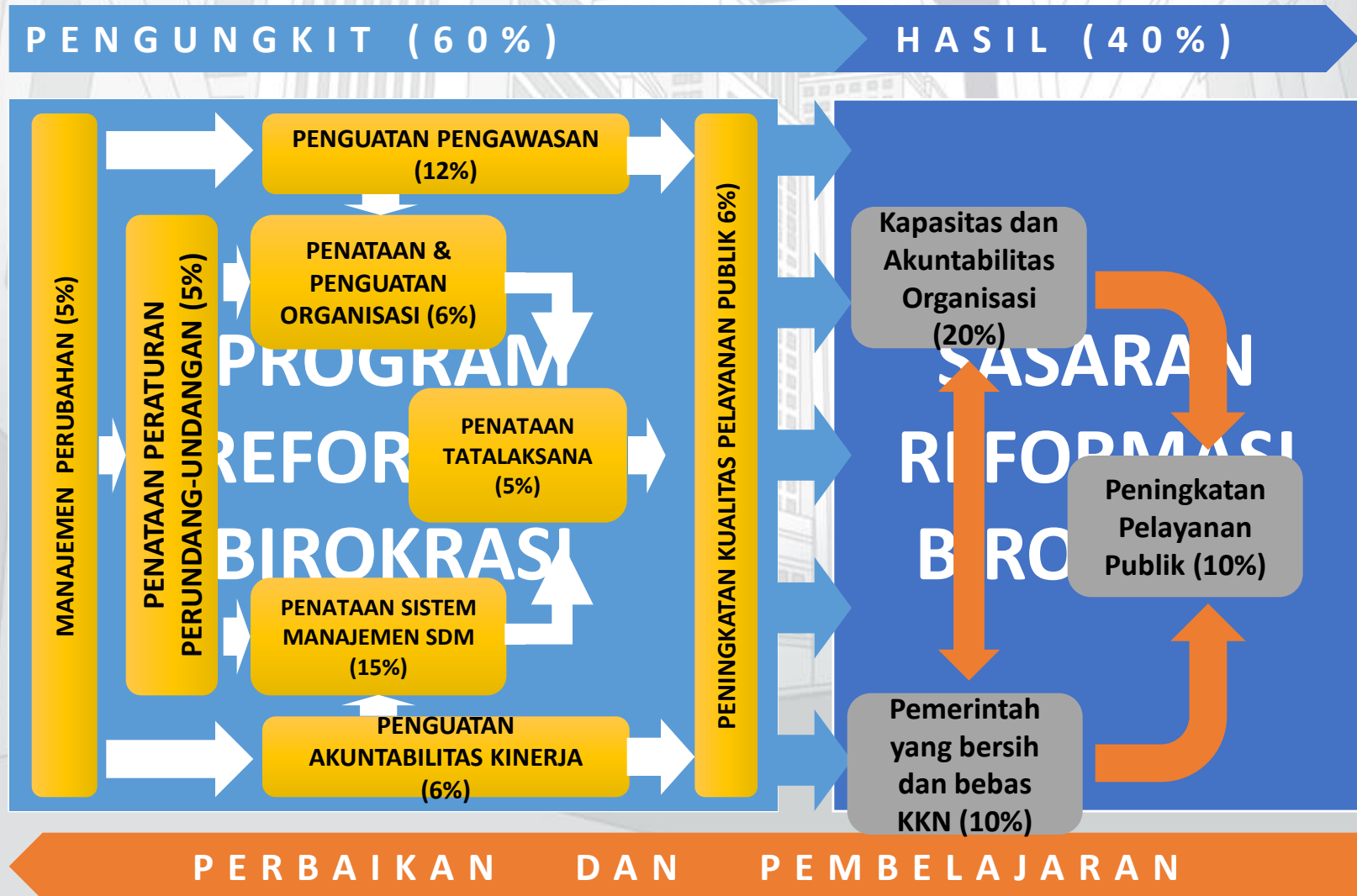
pelayanan publik yang baik dan berkualitas

**MENDORONG
PELAKSANAAN**

EVALUASI

1. REFORMASI BIROKRASI
2. ZONA INTEGRITAS
3. AKUNTABILITAS KINERJA

Kerangka Logis Evaluasi RB



Komponen Hasil 40%

I. KAPASITAS DAN AKUNTABILITAS KINERJA ORGANISASI (20)		20,00	PENJELASAN	
1.	Nilai Akuntabilitas Kinerja (14)	14,00	Diisi dengan nilai hasil evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	0-100
2.	Nilai Kapasitas Organisasi (Survei Internal) (6)	6,00	Diisi dengan nilai hasil Survei Internal Kapasitas Organisasi	0-5
II. PEMERINTAH YANG BERSIH DAN BEBAS KKN (10)		10,00		
1.	Nilai Persepsi Korupsi (Survei Eksternal) (7)	7,00	Diisi dengan nilai hasil Survei Eksternal atas Persepsi Korupsi	0-4
2.	Opini BPK (3)	3,00	Diisi dengan Opini BPK atas Laporan Keuangan	WTP/WTP-DPP/WDP/TMP/TW/Tidak Ada Laporan
III. KUALITAS PELAYANAN PUBLIK (10)		10,00		
1.	Nilai Persepsi Kualitas Pelayanan (Survei Eksternal) (10)	10,00	Diisi dengan Nilai Hasil Survei Eksternal Kualitas Pelayanan	0-4
TOTAL HASIL KOMPONEN RB		40,00		

8 AREA PERUBAHAN REFORMASI BIROKRASI



1

MENTAL APARATUR

TATALAKSANA

5



2

PENGAWASAN

SDM ASN

6



3

AKUNTABILITAS

PERATURAN
PERUNDANG-
UNDANGAN

7



4

KELEMBAGAAN

PELAYANAN PUBLIK



8
AREA PERUBAHAN

Kerangka Logis pelaksanaan Reformasi Birokrasi

No.	Sasaran Reformasi Birokrasi	Area Perubahan Reformasi Birokrasi	
1	Pemerintah yang bersih, akuntabel, dan berkinerja tinggi	1	Manajemen Perubahan;
		2	Penguatan Pengawasan.
		3	Penguatan Akuntabilitas Kinerja;
2	Pemerintah yang efektif dan efisien	4	Penataan dan Penguatan Organisasi;
		5	Penataan Tata Laksana;
		6	Penataan Sistem Manajemen SDM;
		7	Penataan Peraturan Perundang-undangan;
3	Pelayanan publik yang baik dan berkualitas	8	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik;

DASAR HUKUM AKUNTABILITAS KINERJA



PERPRES 29 TAHUN 2014 tentang SAKIP

```
graph TD; A[PERPRES 29 TAHUN 2014 tentang SAKIP] --> B[Permenpanrb 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Laporan Kinerja]; A --> C[Permenpanrb 12 tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah]; B --> D[Penekanan: 1. Pengukuran kinerja organisasi sampai dengan individu 2. Keselarasan perencanaan kinerja dengan kebijakan nasional 3. Pemerintah Provinsi mendorong akuntabilitas di Pemerintah Kab/Kota]; C --> D;
```

Permenpanrb 53 tahun 2014
tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja,
Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu
Laporan Kinerja


Permenpanrb 12 tahun 2015
tentang Pedoman Evaluasi atas
Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah

Penekanan:

1. Pengukuran kinerja organisasi sampai dengan individu
2. Keselarasan perencanaan kinerja dengan kebijakan nasional
3. Pemerintah Provinsi mendorong akuntabilitas di Pemerintah Kab/Kota

AKUNTABILITAS SEBAGAI SALAH SATU ASAS

Undang – Undang No 28 tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih
dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme



Asas-asas umum penyelenggaraan negara:

- Kepastian Hukum
- Tertib Penyelenggaraan Negara
- Kepentingan Umum
- Keterbukaan
- Proporsionalitas
- Profesionalitas
- Akuntabilitas

MAKNA AKUNTABILITAS

“Setiap
program dan kegiatan
dari penyelenggara negara harus
dapat dipertanggungjawabkan
hasilnya”

AKUNTABILITAS BERORIENTASI PADA HASIL

UU NO. 17/2003 (KEUANGAN NEGARA)
UU NO. 1/2004 (PERBENDAHARAAN NEGARA)
UU NO. 15/2003 (PEMERIKSAAN PENGELOLAAN DAN TANGGUNG JAWAB KN)



Asas KEUANGAN NEGARA:

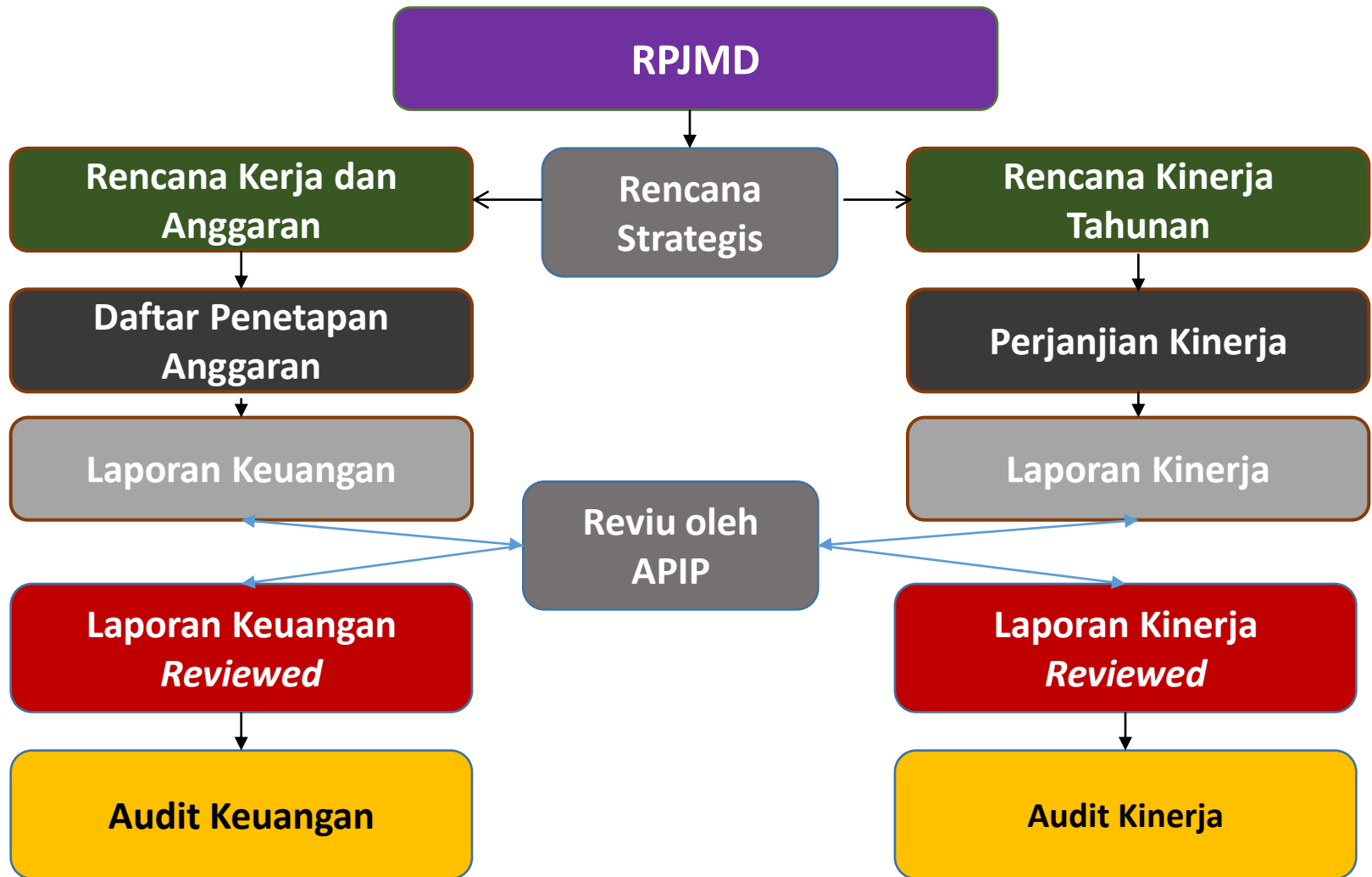
- Akuntabilitas berorientasi pada hasil
- Profesionalitas
- Proporsionalitas
- Keterbukaan
- Pemeriksaan keuangan oleh badan pemeriksa yang bebas dan mandiri dalam pengelolaan keuangan negara

AKUNTABILITAS KINERJA DAN AKUNTABILITAS KEUANGAN

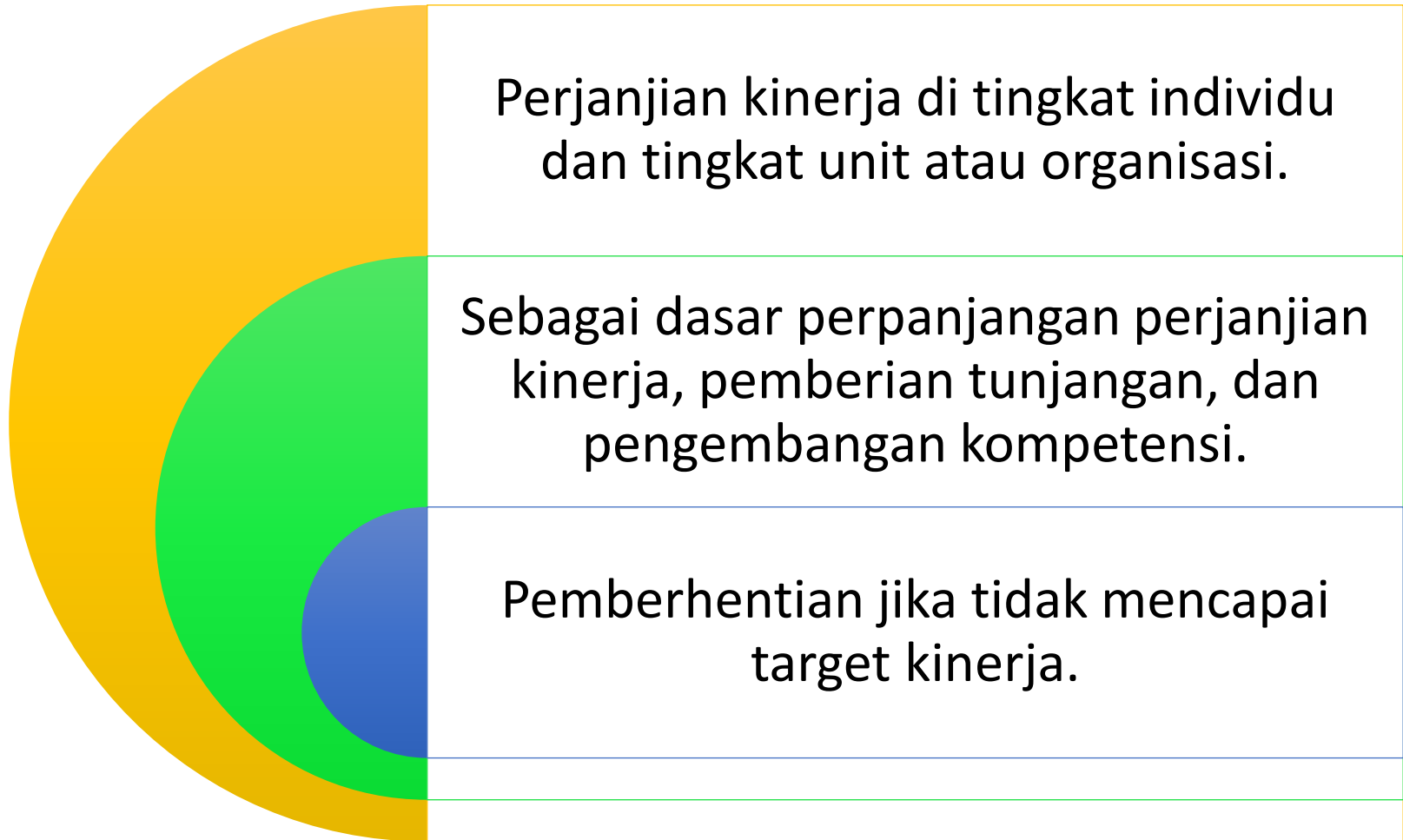


Akuntabilitas
Kinerja menjadi
bagian yang tidak
terpisahkan
dengan
akuntabilitas
keuangan
PP Nomor 8/2006

PERPRES 29 TENTANG SAKIP



PERJANJIAN KINERJA UU ASN



Akuntabilitas Kinerja sebagai dasar pelaksanaan Reformasi Birokrasi



SISTEM MANAJEMEN KINERJA NASIONAL

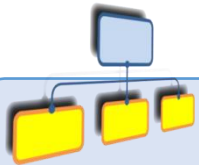


**MENYUSUN RPJMN
DAN MEMASTIKAN
RENCANA STRATEGIS
K/L SEJALAN DENGAN
RPJMN**

**MEMASTIKAN
PERENCANAAN
PEMBANGUNAN
DAERAH SESUAI
DENGAN PRINSIP-
PRINSIP
PERENCANAAN
PEMBANGUNAN
DAERAH**

***MEMASTIKAN
AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH
BERORIENTASI PADA
HASIL, DAN MEMASTIKAN
KETERKAITAN ANTARA
KINERJA ORGANISASI,
UNIT KERJA, DAN
INDIVIDU PEGAWAI***

**MEMASTIKAN
OPTIMALISASI DAN
KETERSEDIAAN
ANGGARAN**



**MEMASTIKAN
KETEPATAN
KELEMBAGAAN
INSTANSI PEMERINTAH
DALAM MEWUJUDKAN
KINERJA UTAMA YANG
HARUS DIHASILKAN**



**MEMASTIKAN SETIAP
PEGAWAI PADA
BERBAGAI TINGKATAN
MEMBERIKAN
KONTRIBUSI PADA
PENCAPAIAN KINERJA
UTAMA INSTANSI
PEMERINTAH**



**MEMASTIKAN SETIAP
INSTANSI PEMERINTAH
MENERAPKAN SISTEM
AKUNTABILITAS KINERJA
SEHINGGA
PEMERINTAHAN
BERORIENTASI PADA
HASIL**



**PEMERINTAHAN
YANG BERSIH
DAN
AKUNTABEL**

**MEMASTIKAN SETIAP
INSTANSI PEMERINTAH
MENERAPKAN MANAJEMEN
PELAYANAN YANG DAPAT
MEMBERIKAN PELAYANAN
BERKUALITAS DAN BEBAS
DARI KKN BAGI MASYARAKAT**

- Penguatan Akuntabilitas Kemampuan pemerintah untuk mempertanggungjawabkan berbagai sumber yang diberikan kepadanya bagi kemanfaatan publik seringkali menjadi pertanyaan masyarakat.
- Pemerintah dipandang belum mampu menunjukkan kinerja melalui pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang mampu menghasilkan outcome (hasil yang bermanfaat) bagi masyarakat.
- Karena itu, perlu diperkuat penerapan sistem akuntabilitas yang dapat mendorong birokrasi Pemda lebih berkinerja dan mampu mempertanggungjawabkan kinerjanya sesuai dengan segala sumber-sumber yang dipergunakannya

- **Sasaran Reformasi Birokrasi**

Birokrasi yang bersih, akuntabel dan berkinerja tinggi

- **Program Mikro**

Penguatan Akuntabilitas Kinerja

- **Rencana Aksi**

1. Melibatkan pimpinan dalam penyusunan Renstra, Renja/RKT, PK
2. Monitoring dan evaluasi capaian kinerja oleh pimpinan langsung secara berkala
3. Pelaksanaan pelaporan akuntabilitas kinerja berbasis elektronik

Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan dalam mencapai misi dan tujuan organisasi. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Target yang ingin dicapai melalui program ini adalah:

- 1. Meningkatkan kinerja instansi pemerintah;**
- 2. Meningkatkan akuntabilitas instansi pemerintah.**

Indikator pencapaian program penguatan akuntabilitas kinerja adalah:

1. Keterlibatan pimpinan secara langsung dalam penyusunan perencanaan strategis (renstra), keterlibatan pimpinan saat penyusunan perjanjian kinerja, dan pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala. Penyusunan Renstra, Renja, Perjanjian Kinerja, dan Laporan Kinerja harus didasarkan pada Indikator Kinerja Utama (IKU).
2. Pengelolaan akuntabilitas kinerja yang terdiri dari pengelolaan data kinerja, pengukuran kinerja, dan pelaporan kinerja dimana dalam untuk mengukurnya digunakan indikator dibawah ini:
 - 1) Unit kerja telah memiliki dokumen perencanaan;
 - 2) Dokumen perencanaan telah berorientasi hasil;
 - 3) Indikator kinerja telah memiliki kriteria specific, measurable, acheivable, relevant and time bound (SMART);
 - 4) Perjanjian Kinerja dibuat sampai pada level pejabat eselon IV (empat) dan Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana;
 - 5) Unit kerja telah menyusun laporan kinerja tepat waktu;
 - 6) Pelaporan kinerja telah memberikan informasi tentang kinerja; dan
 - 7) Unit kerja telah berupaya meningkatkan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja.

Penguatan Akuntabilitas Kinerja

20

No	Rekomendasi	Rencana Aksi/Pogram PD	Unit Kerja	Kriteria Keberhasilan
1	Mengoptimalkan pimpinan pada saat penyusunan renstra dan perjanjian	Reviu pelaksanaan renstra dan perjanjian kinerja yang melibatkan pimpinan	Seluruh Unit Kerja, Pokja RB	Selarasnya kebijakan perencanaan, penganggaran, dan pelaporan kinerja
		Penyempurnaan SAKIP sebagai pilar manajemen kinerja	Seluruh Unit Kerja, Pokja RB	Meningkatnya akuntabilitas satuan kerja organisasi
2	Keterlibatan Pimpinan secara langsung dalam melakukan pemantauan kinerja secara berkala	Evaluasi pencapaian kinerja oleh pimpinan tertinggi secara berkala	Seluruh Unit Kerja, Pokja RB	Terlaksananya proses pemantauan capaian kinerja secara langsung oleh pimpinan tertinggi dalam mengambil kebijakan
3	Mengoptimalkan kapasitas SDM ASN dengan mengintegrasikan sistem pengukuran kinerja dengan organisasi	Perancangan sistem pengukuran kinerja berbasis elektronik yang terintegrasi dan bisa diakses oleh seluruh unit organisasi/individu	Seluruh Unit Kerja, Pokja RB	Meningkatkan kinerja organisasi yang didukung oleh kinerja individu serta terwujudnya pemberian remunerasi berbasis kinerja

Beberapa Permasalahan Penguatan Akuntabilitas Kinerja



Ketidakpahaman Pimpinan



Ketidakmampuan merencanakan kinerja



Kelemahan ukuran kinerja



Pemanfaatan dan pengelolaan informasi kinerja tidak optimal



Evaluasi kinerja internal tidak berjalan baik



AKUNTABILITAS

Meningkatnya kualitas
penerapan sistem
akuntabilitas
keuangan dan kinerja
yang **terintegrasi**

Meningkatnya
penerapan sistem
manajemen kinerja

Meningkatnya
akuntabilitas aparatur

AKUNTABILITAS KINERJA



RESULT ORIENTED GOVERNMENT

Tujuan, sasaran,
program kegiatan
mengalir

IKU OPD
(outcome)
memperhatikan
sasaran Pemda

Ada
keterkaitan
(*Causality*)

Terukur &
relevan



Perencanaan kinerja



Perjanjian kinerja



Pengukuran kinerja



Pelaporan kinerja



Evaluasi kinerja

*Review
manajemen
secara
berkala*

Perbesar
alokasi
belanja publik

*Money
follow
program*

Penerapan
remunerasi

*Performance based
organization*



Good
Governance



Result Oriented
Government

Kejelasan Tujuan Organisasi (Outcomes)

Ukuran Keberhasilan Pencapaian Tujuan (Performance Indicators)

Target Kinerja

Keterkaitan antara Tujuan dengan Cara Mencapainya

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Membangun Pemerintah
yang
Akuntabel dan Terukur

Pemerintah yang mampu
mempertanggungjawabkan
hasil/manfaat kepada masyarakat
atas penggunaan anggaran

KOMPONEN AKUNTABILITAS KINERJA

30%

PERENCANAAN KINERJA

- Setiap instansi harus memiliki rencana kinerja yang baik, tepat dan jelas sasaran dan tujuannya dengan indikator yang tepat baik dilevel outcome, output maupun input.

25%

PENGUKURAN KINERJA

- Setiap instansi melakukan pengukuran kinerja secara berkala dengan metode yang tepat dengan membandingkan antara target dengan capaiannya.

15%

PELAPORAN KINERJA

- Setiap instansi melaporkan kinerjanya secara berjenjang dari unit terbawah hingga tertinggi.

10%

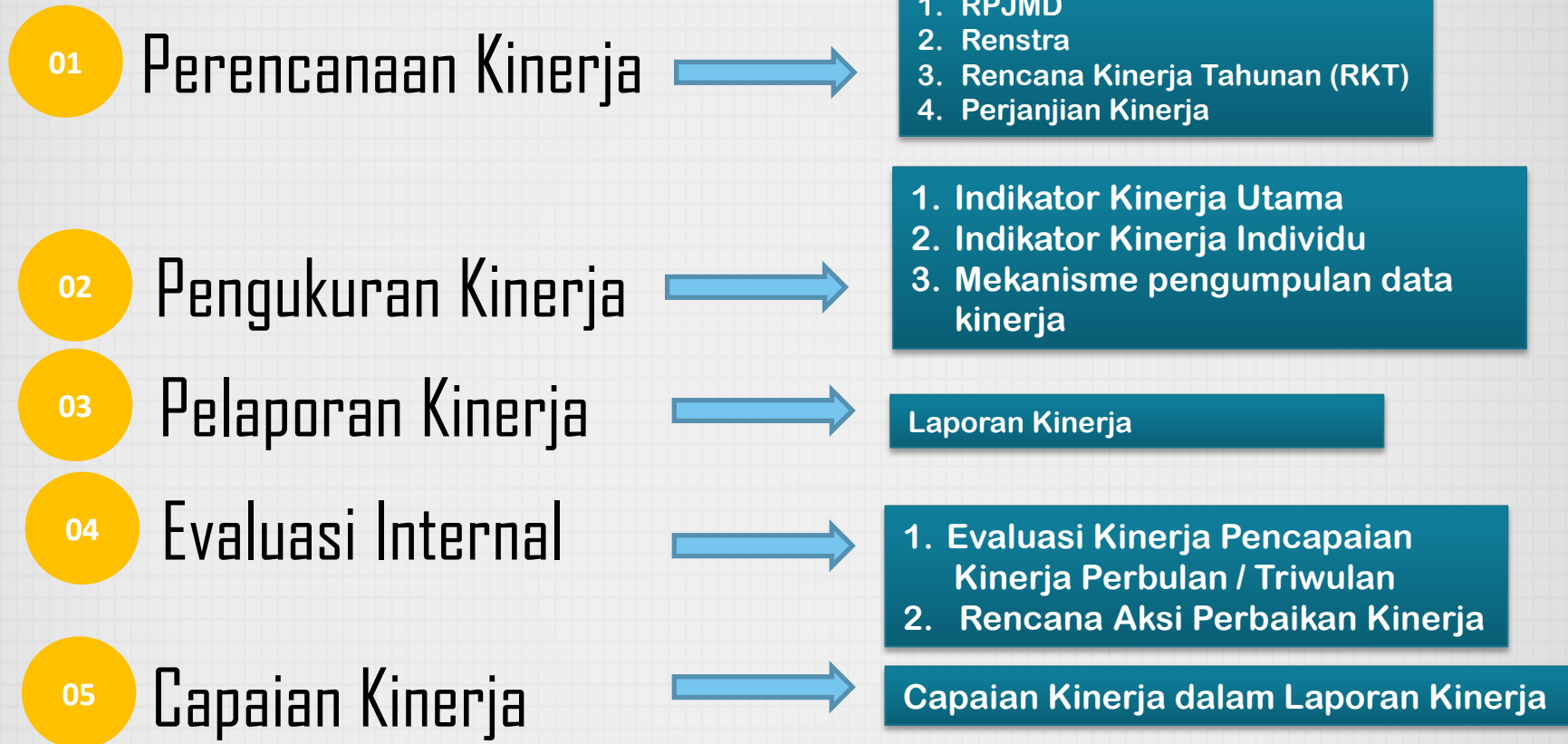
EVALUASI KINERJA

- Setiap instansi melakukan evaluasi capaian kinerjanya untuk mengidentifikasi keberhasilan, kegagalan, hambatan dan tantangan yang dihadapi pada setiap level mulai terbawah hingga tertinggi

20%

CAPAIAN KINERJA

- Capaian kinerja yang dihasilkan oleh instansi pemerintah pada kurun waktu satu tahun.



AKUNTABILITAS KINERJA BAIK

PERENCANAAN KINERJA BAIK

PEMANFAATAN
PERENCANAAN

CASCADING KINERJA BAIK

RENST
RA
BAIK

PK
BAIK

RENCA
NA
AKSI
BAIK

PEMENUHAN
PERENCANAAN

PENGUKURAN KINERJA BAIK

PEMANFAATAN
PENGUKURAN

MONITORING KINERJA BAIK

IKU
BAIK

IK
INDIVI
DU
BAIK

PEMENUHAN
PENGUKURAN

PELAPORAN KINERJA BAIK

PEMANFAATAN
PELAPORAN

INTERPRETASI DAN
AKUNTABILITAS KINERJA BAIK

DATA
BAIK

INFOR
MASI
KINERJ
A BAIK

PEMENUHAN
PELAPORAN

EVALUASI KINERJA BAIK

PEMANFAATAN EVALUASI

FEEDBACK KINERJA BAIK

EVALU
ASI
AKIP
BAIK

EVALU
ASI
PROGR
AM
BAIK

PEMENUHAN EVALUASI

KEBIJAKAN BAIK

DELIVERY
KEBIJAKAN BAIK

E-APLIKASI BAIK

DATA BAIK

EVALUASI AKIP
BAIK

INSTRUMEN
EVALUASI BAIK

IMPLEMENTASI
KEBIJAKAN

PEMATERI BAIK

INFORMASI

EVALUATOR
BAIK

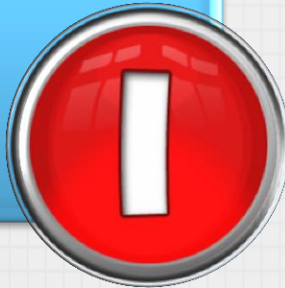
EVALUASI
KEBIJAKAN

LANGKAH STRATEGIS PERBAIKAN

Lima *Langkah strategis*

- **Komitmen menerapkan manajemen kinerja berorientasi hasil**

Seluruh jajaran pimpinan



- **Intregated Development Plan (Rencana Pengembangan terintegrasi)**

Bappeda
Seluruh SKPD

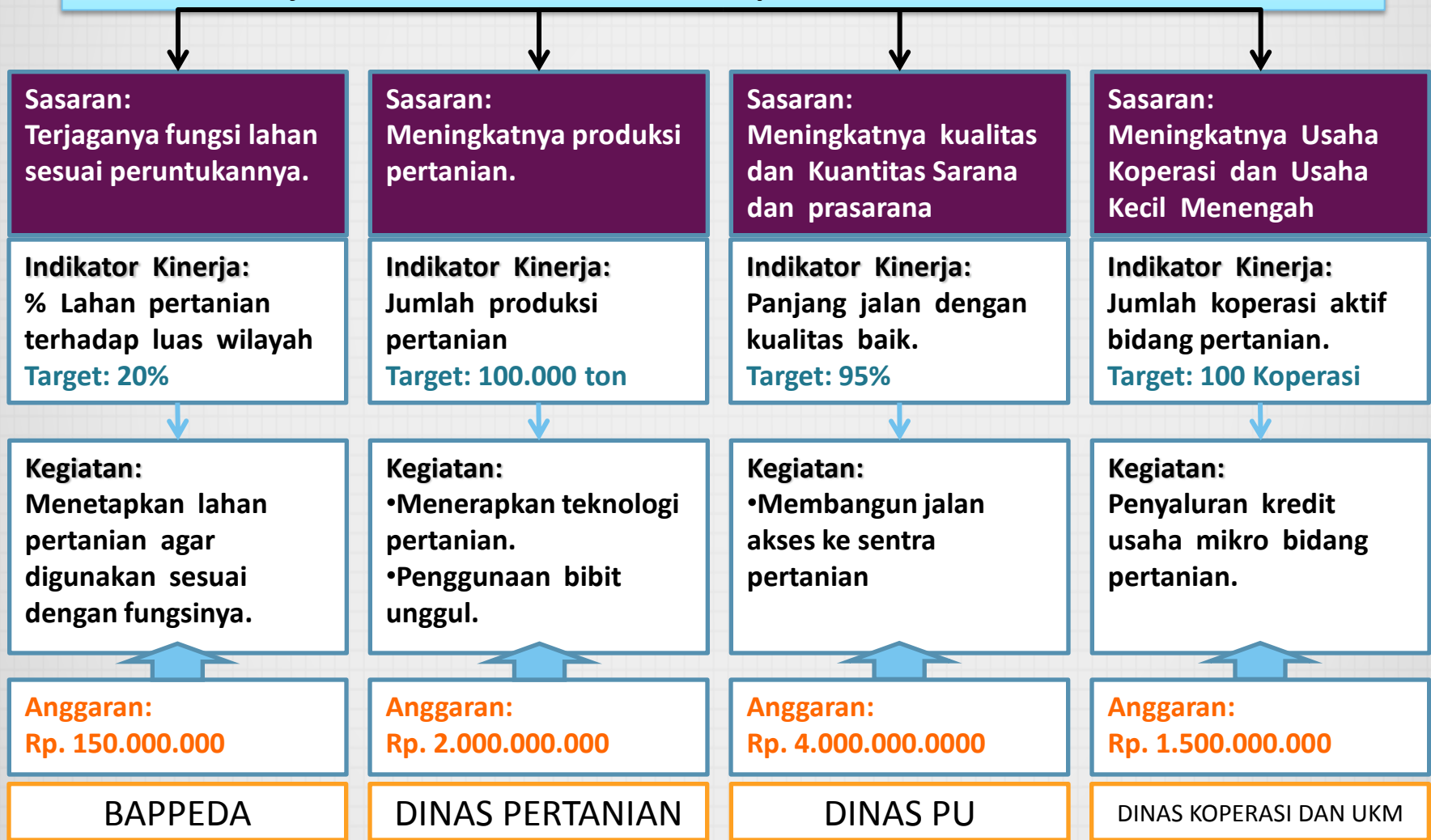


PENYELARASAN KINERJA PEMERINTAH DAERAH

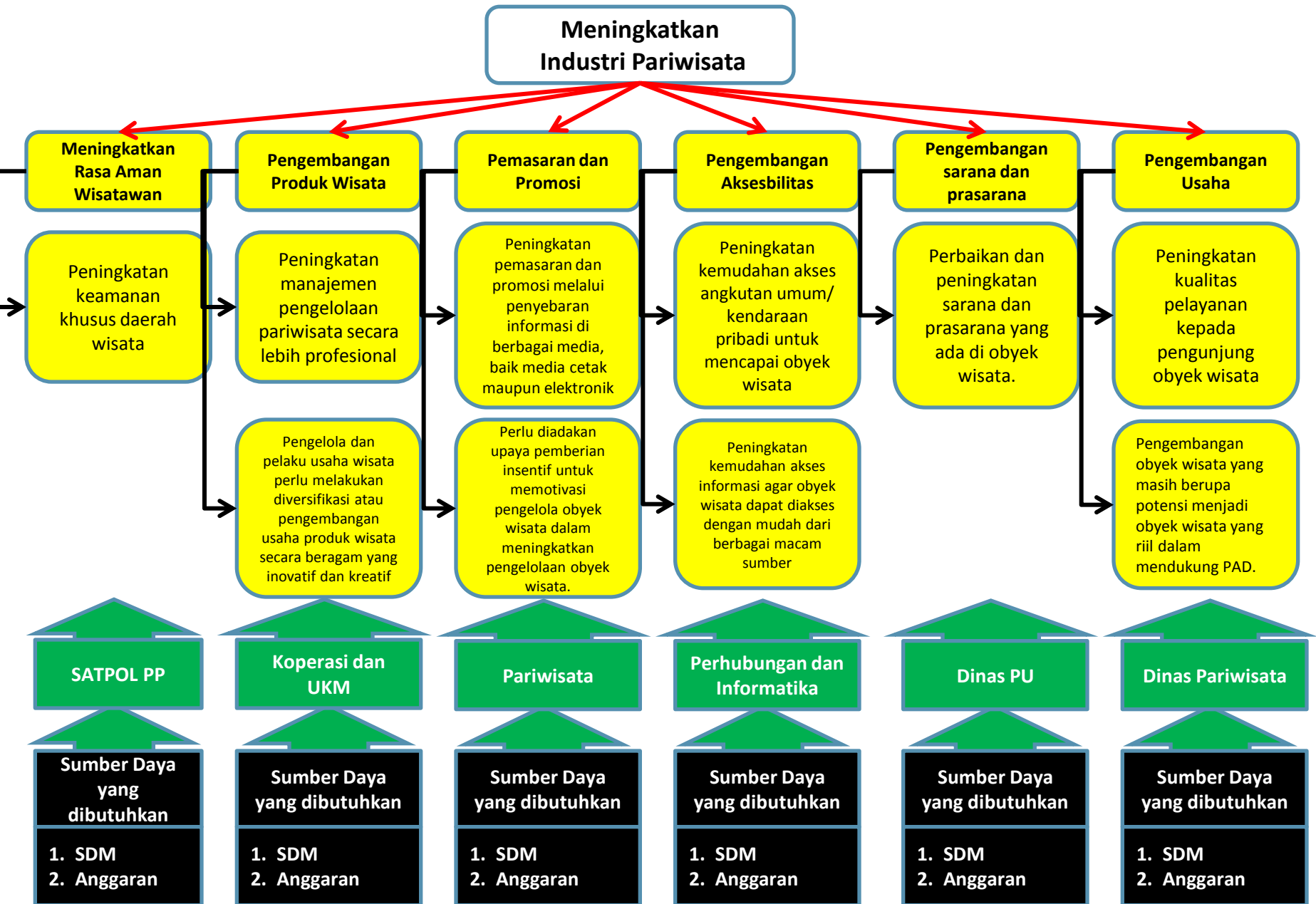
32

RPJMD

Sasaran : Meningkatkan sektor Pertanian dalam mendukung pertumbuhan ekonomi
Indikator Kinerja : Pertumbuhan PDRB sektor pertanian



CONTOH PERENCANAAN TERINTEGRASI



Lima *Langkah strategis*

- Reviu IKU hingga level individu untuk melihat efektivitas dan efisiensi organisasi

Seluruh SKPD



- Meningkatkan pemanfaatan informasi kinerja melalui pengumpulan data kinerja berbasis TI:
 - monev capaian Kinerja
 - Tindak lanjut hasil monev
 - Analisis efektivitas dan efisiensi

Inspektorat
Seluruh SKPD



KRITERIA INDIKATOR KINERJA UTAMA

SPECIFIC

Jelas dan fokus tentang kondisi kinerja yang akan diukur serta harus dapat diinterpretasikan sama.

MEASURABLE

Dapat diukur sehingga dapat menentukan sejauhmana pencapaian kinerja sudah diperoleh

ATTAINABLE

Realistis, praktis, dan dapat dicapai sesuai dengan ketersediaan sumber-sumber yang dimiliki, pengetahuan serta waktu

RELEVANT

Harus terkait dengan sasaran pembangunan (outcomes) yang akan diukur pencapaian kinerjanya

TIME - BOUND

Harus memiliki kejelasan waktu pencapaian



RINGKASAN INFORMASI - INDIKATOR KINERJA UTAMA

DEFINISI

IKU

Kinerja utama dari instansi pemerintah adalah hal utama yang harus diwujudkan oleh instansi yang

bersangkutan sesuai dengan tugas dan fungsi serta kewenangan yang dimandatkan/diberikan.

Indikator kinerja utama adalah alat ukur yang mengindikasikan pencapaian kinerja paling utama sebuah instansi pemerintah.

MENGAPA IKU DIPERLUKAN

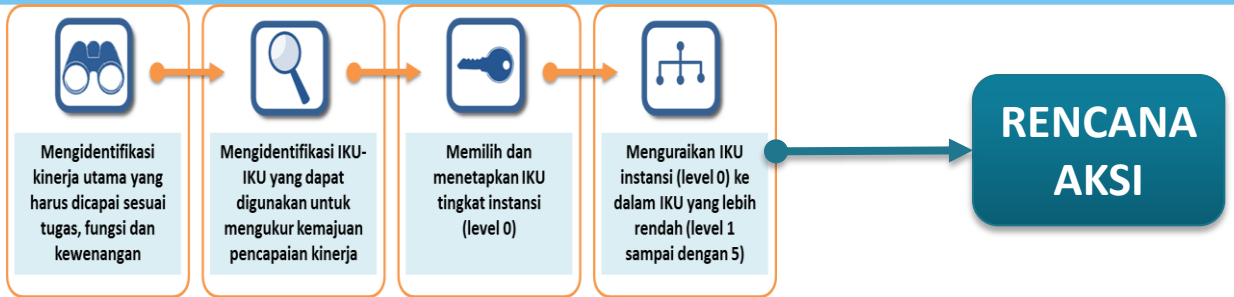
IKU merupakan alat untuk menilai kemajuan pencapaian kinerja, sehingga dapat diketahui apakah sudah berjalan sesuai dengan mandat yang diberikan kepada instansi

IKU memberikan fokus dan arah yang jelas bagi pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan

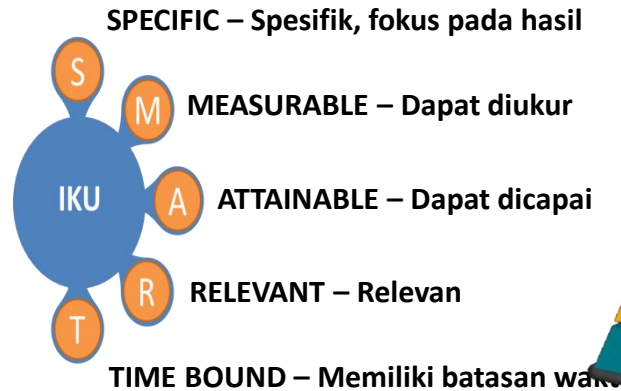
IKU menjadi dasar pengembangan pengukuran, analisis dan evaluasi kinerja

IKU menciptakan konsensus bersama seluruh unit kerja sehingga dapat menghindari kesalahan interpretasi dalam pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan termasuk dalam menilai kemajuan pencapaian

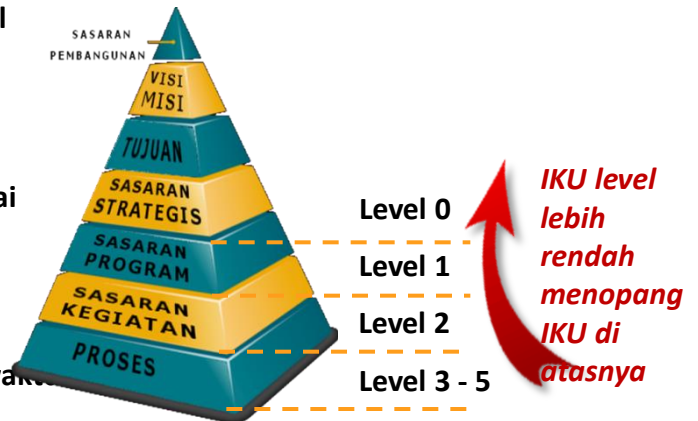
BAGAIMANA MENETAPKAN IKU



BAGAIMANA IKU YANG BAIK



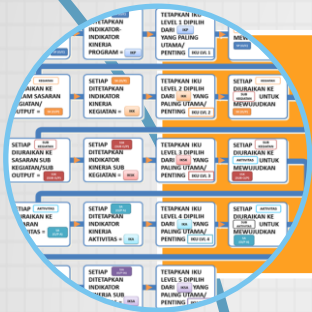
BAGAIMANA PENGURAIAN IKU



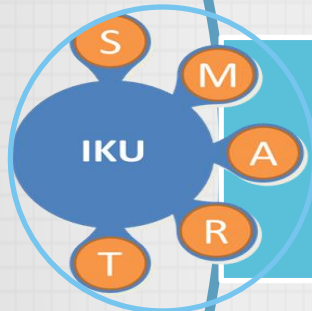
BAGAIMANA IKU BERKAITAN DENGAN KINERJA INDIVIDU



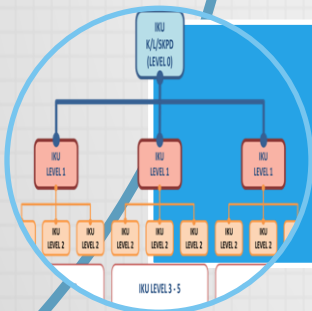
MEKANISME PENJABARAN IKU



Memperhatikan Proses



Memperhatikan Unsur Pembentukan



Membagi Wilayah/ Sektor

Kab/Kota dengan nilai akuntabilitas BAIK dan Jumlah kab/kota yang dievaluasi, akan berkontribusi pada nilai Provinsi

Indikator kinerja tujuan

Rencana Kinerja Tahunan

Perjanjian Kinerja penerima Dana Dekonsentrasi

Definisi Indikator Kinerja Utama

Penyelarasan kinerja hingga individu

Peningkatan Penerapan SAKIP

Memastikan cascading kinerja telah mantap dan berhasil mewujudkan pohon kinerja

NASIONAL

SASARAN PEMBANGUNAN
NASIONAL
(IMPACT)

PEMDA

SASARN STRATEGIS
RPJMD
(OUTCOME/IMPACT)

OPD

SASARAN OPD
(OUTCOME)

SASARAN OPD
(OUTCOME)

ESELON III

SASARAN PROGRAM
(INTERMEDIATE
OUTCOME)

SASARAN PROGRAM
(INTERMEDIATE
OUTCOME)

SASARAN PROGRAM
(INTERMEDIATE
OUTCOME)

SASARAN PROGRAM
(INTERMEDIATE
OUTCOME)

ESELON IV

Sasaran
kegiatan

Sasaran
kegiatan

Sasaran
kegiatan

Sasaran
kegiatan

Sasaran
kegiatan

Sasaran
kegiatan

Sasaran
kegiatan

Sasaran
kegiatan

PELAKSANA

Sasaran
aktivitas

Sasaran
aktivitas

Sasaran
aktivitas

Sasaran
aktivitas

Lima *Langkah strategis*



- **Membangun budaya kinerja secara berkelanjutan melalui:**
 - **Evaluasi Kinerja**
 - **Monev Kinerja**
 - **Supervisi dan Coaching**

**Bappeda
Inspektorat
Seluruh SKPD**



TERIMA KASIH

Pokok Bahasan

- 1 Pengertian.....●
- 2 Kriteria Indikator Kinerja.....●
- 3 Perumusan Indiaktor Kinerja.....●
- 4 IK pada Instansi Pemerintah.....●

❖ Apakah INDIKATOR KINERJA?

- **Indikator Kinerja** adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan dan sasaran yang telah ditetapkan.
- **Indikator Kinerja** memberikan penjelasan, baik secara kuantitatif maupun secara kualitatif, mengenai apa yang akan diukur untuk menentukan apakah tujuan sudah tercapai.
- **Indikator Kinerja** juga menetapkan bagaimana kinerja akan diukur dengan suatu skala atau dimensi tanpa menyinggung tingkat pencapaian khusus.

INDIKATOR KINERJA

- ❖ **SASARAN**
- ❖ **KEGIATAN ...**



- 1. INPUT**
- 2. OUTPUT**
- 3. OUTCOME**
- 4. BENEFIT**
- 5. IMPACT**

Kriteria



Indikator
Kinerja

Langsung

Obyektif

Kuantitatif

Terinci

Praktis

Dapat diyakini

Suatu indikator kinerja harus dapat mengukur sedekat mungkin dengan hasil yang akan diukur. Indikator kinerja tidak seharusnya dikaitkan pada tingkat yang lebih tinggi atau lebih rendah dibandingkan dengan hasil yang diukur.

Misalnya, “*Banyaknya alat kontrasepsi yang digunakan*” adalah ukuran langsung dari “*Peningkatan penggunaan metode Keluarga Berencana*”.

Tetapi “*Jumlah penyedia jasa yang terlatih*”, bukanlah ukuran langsung dari “*Peningkatan pelayanan jasa*”. Penyedia jasa berupa pegawai terlatih, tidak berarti secara otomatis akan memberikan pelayanan yang lebih baik.

Jika tidak memungkinkan untuk menggunakan pengukuran langsung, satu atau lebih indikator pengganti mungkin dapat digunakan. Misalnya, pada suatu wilayah desa sangat sulit untuk mengukur tingkat pendapatan secara langsung.

Pengukuran seperti *“Persentase keluarga di desa yang rumahnya berlantai semen”* atau *“Persentase keluarga di desa yang memiliki radio, atau televisi, atau sepeda”*, mungkin akan berguna meskipun merupakan pengukuran pengganti yang sangat kasar.

Asumsi yang digunakan adalah bahwa apabila suatu keluarga memiliki pendapatan yang lebih baik dibandingkan dengan keluarga lain, mereka akan membeli barang tertentu seperti yang disebutkan di atas.

Apabila terdapat bukti yang meyakinkan dan memadai (misalnya, didasarkan pada riset atau pengalaman di tempat lain), maka indikator pengganti dapat merupakan indikator yang memadai, meskipun tidak seakurat pengukuran langsung.

Indikator yang obyektif tidak memiliki ambiguitas mengenai apa yang akan diukur. Terdapat suatu kesepakatan umum tentang interpretasi terhadap hasil, yaitu indikator tersebut hanya mempunyai satu dimensi dan tepat secara operasional.

Mempunyai satu dimensi artinya bahwa indikator hanya mengukur satu fenomena setiap saat. Hindari untuk menggabungkan terlalu banyak fenomena dalam satu indikator.

Tepat secara operasional artinya tidak ada ambiguitas atas data apa yang akan dikumpulkan untuk suatu indikator. Misalnya, "*Jumlah perusahaan eksportir yang berhasil*" adalah masih argumentatif, tetapi "*Jumlah perusahaan eksportir yang mendapatkan peningkatan pendapatan sebesar minimal 5%*" adalah sesuatu yang tepat secara operasional.

Indikator kuantitatif adalah indikator dalam angka (jumlah atau persentase nilai dolar, tonase, dsb). Indikator kualitatif adalah indikator yang bersifat pengamatan deskriptif (pendapat ahli atas suatu kekuatan instansi atau penjelasan mengenai suatu perilaku).

Meskipun indikator kuantitatif tidak lebih obyektif, ketepatan angkanya memungkinkan kesepakatan atas data mengenai hasil dan biasanya lebih disukai.

Meskipun indikator kuantitatif yang efektif digunakan, indikator kualitatif dapat mendukung angka dan persentase dengan kekayaan yang dimiliki informasi yang menghidupkan hasil program.

Indikator kinerja yang bersifat kuantitatif akan lebih mudah diukur dibandingkan indikator kinerja yang bersifat kualitatif.

Merinci/memilah hasil program di tingkat masyarakat dari segi jenis kelamin, umur, lokasi, atau dimensi lainnya biasanya penting dari sudut pandang birokrat.

Pengalaman menunjukkan pengembangan kegiatan sering memerlukan pendekatan yang berbeda untuk kelompok yang berbeda dan mempengaruhi kelompok tersebut dengan cara yang berbeda.

Data yang terinci membantu menelusuri apakah kelompok tertentu berpartisipasi atau tidak, dan kemanfaatan melibatkan kelompok tersebut dalam kegiatan. Oleh karena itu, adalah baik bahwa indikator kinerja harus sensitif terhadap perbedaan tersebut.

Indikator kinerja dikatakan praktis apabila data dapat diperoleh pada saat yang tepat dengan biaya yang wajar.

Aparat pemerintah memerlukan data yang dapat dikumpulkan sesering mungkin untuk memberikan informasi mengenai suatu progres sebagai dasar mengambil keputusan.

Untuk mendapatkan informasi kinerja yang berguna, instansi seharusnya menyadari untuk tidak mengeluarkan biaya yang berlebihan. Berdasarkan pengalaman suatu instansi, biaya monitoring kinerja jumlahnya antara 3 - 10% dari jumlah sumberdaya program.

Perumusan Indikator Kinerja

Indikator Kinerja dapat dinyatakan dalam bentuk pernyataan **kualitatif** atau **kuantitatif**. Agar bermanfaat, kedua jenis indikator kinerja tersebut harus memenuhi karakteristik kinerja yang baik.



Kualitatif:

indikator kinerja yang dinyatakan dalam bentuk kalimat tanpa ada unsur kuantitatif dan menunjukkan kualitas sesuatu.

Kuantitatif:

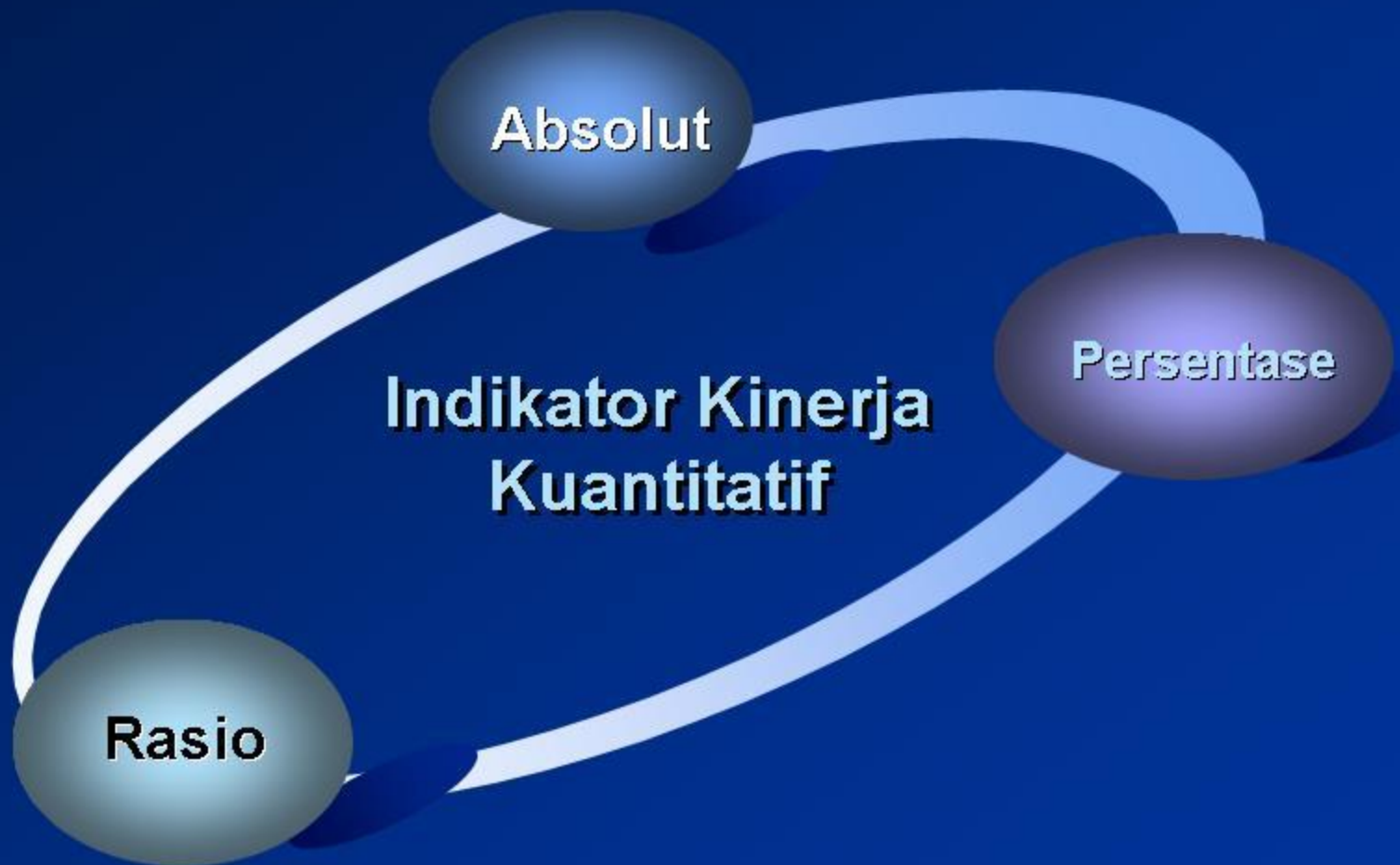
indikator kinerja yang mengandung unsur angka atau menyatakan kuantitas sesuatu. Dapat berupa angka absolut, persentase, rasio, atau indeks.

INDIKATOR KINERJA KUALITATIF

- ❖ Indikator kinerja **kualitatif** dapat terjadi jika sulit menyatakan indikator kinerja secara kuantitatif dan ini biasanya timbul pada saat menetapkan indikator tujuan, misalnya, tentang kepuasan masyarakat atau kepuasan pengguna jasa.

Nama Indikator	Penjelasan Indikator Kinerja
Tingkat kehidupan politik yang lebih demokratis.	Kondisi sosial politik masyarakat yang ditandai dengan semakin terjaminnya hak-hak dasar warga negara: kebebasan berorganisasi, kebebasan berpendapat, kebebasan pers, dan lain-lain.

Indikator Kinerja KUANTITATIF



IK KUANTITATIF ABSOLUT

- ❖ Indikator kinerja **kuantitatif absolut** adalah indikator kinerja yang dinyatakan dengan angka absolut, misalnya :

Nama Indikator	Penjelasan Indikator Kinerja
PDRB (Produk Domestik Regional Bruto)	Maksud indikator ini adalah untuk memberi gambaran tentang pendapatan rata-rata suatu daerah secara bruto dalam satu tahun.

IK KUANTITATIF PERSENTASE

- ❖ Indikator kinerja **kuantitatif persentase** adalah indikator kinerja yang dinyatakan dengan menunjukkan persentase suatu porsi tertentu, misalnya :

Nama Indikator	Penjelasan Indikator Kinerja
Laju Pertumbuhan Produktivitas Sektor Pertanian (%).	Maksud dari indikator ini adalah untuk memberi gambaran mengenai pertumbuhan produktivitas suatu daerah di bidang pertanian dalam satu tahun.

IK KUANTITATIF RASIO

- ❖ Indikator kinerja **kuantitatif rasio** adalah indikator kinerja yang dinyatakan dengan menunjukkan rasio perbandingan antara sesuatu dengan yang lain, misalnya:

Nama Indikator	Penjelasan Indikator Kinerja
Tingkat Melek Huruf.	Rasio jumlah penduduk melek huruf dibanding keseluruhan jumlah penduduk. Indikator ini menggambarkan tingkat kualitas hidup manusia, semakin kecil tingkat melek huruf, semakin rendah tingkat pendidikan penduduk dan semakin rendah kualitas hidupnya.

Indikator Kinerja PEMERINTAH DAERAH

Pemerintah Daerah			Satuan Kerja		
Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
Meningkatkan produksi sub sektor tanaman pangan	% peningkatan produksi sub sektor tanaman pangan	10%	Meningkatkan sarana irigasi teknis yang memadai	% peningkatan sarana irigasi yang memadai	5 %
			Terjaminnya ketersediaan saprodi tanaman pangan	% penurunan keluhan petani terhadap ketersediaan saprodi	5 %
			Meningkatkan akses jalan dari dan ke daerah dalam rangka distribusi hasil-hasil pertanian (Dinas PU)	Panjang jalan desa yang dibangun dan ditingkatkan	100km
			Meningkatnya intensifikasi dan ekstensifikasi lahan pertanian	Peningkatan luas lahan pertanian tanaman pangan	100 Ha
				Tingkat produktifitas hasil pertanian tanaman pangan	5%
			Meningkatnya pembinaan terhadap petani dalam rangka penguasaan teknologi pertanian (Dinas Pertanian)	Frekuensi pembinaan	24 kali



LAMPIRAN

GALERI FOTO KEGIATAN



Makan Minum Sosialisasi SAKIP (Snack)



Makan Minum Sosialisasi SAKIP (snack)



Makan Minum Sosialisasi SAKIP (Snack)



Makan Minum Sosialisasi SAKIP (Makan Siang)



Makan Minum Sosialisasi SAKIP (Makan Siang)



Makan Minum Sosialisasi SAKIP (Makan Siang)



MC acara Sosilalisasi SAKIP



Pembaca Do'a Sosilalisasi SAKIP



Menyanyikan Lagu Indonesia Raya pada Sosilalisasi SAKIP



Suasana Sosilalisasi SAKIP



Narasumber sedang memberikan paparan



Moderator dan Narasumber di depan



Menjelaskan tentang Implementasi SAKIP



Sekretaris membuka acara Sosialisasi SAKIP



Backdrop Spanduk Sosialisasi SAKIP



Peserta dengan seksama mendengarkan paparan



Kepala Dinas dan Sekretaris menyimak paparan dari narasumber



Peserta Sosialisasi SAKIP

